

---

© Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI 2015

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi regional/internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen.

Lebih lanjut lihat [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak-hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional  
Biro Kerja Sama Antar-Parlemen  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
Gedung Nusantara III Lantai 6  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Indonesia  
Telepon +6221 5175842, +6221 5715210  
Faks +6221 5715295  
Email [oprkbksap@dpr.go.id](mailto:oprkbksap@dpr.go.id)

**Cetakan Kedua**

x+ 100 halaman; 21cm x 28cm

ISBN : 978-602-95496-8-3



REKOMENDASI PANJA  
BKSAP TAHUN 2015  
DALAM MENGHADAPI

# MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

**CETAKAN KEDUA**

Badan Kerja Sama Antar Parlemen  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Tahun 2015

---

TIM PENYUSUN BUKU REKOMENDASI  
PANJA KERJA SAMA ANTAR PARLEMAN DALAM  
MENGHADAPI MEA 2015

**PENANGGUNG JAWAB**

Drs. H. Saiful Islam, M.Si.

**REDAKTUR**

Chairil Patria, S.IP.,M.Si.

**EDITOR**

Tatang Sutharsa, S.H.

Anne Widyana, SS. M.Si.

**DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER**

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos.

**PEMBUAT ARTIKEL**

Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Yuni Sudarwati, S.Ip.,M.Si.

Anissa Mariana

Dewi Amelia Tresna Wijayanti

Mochamad Ilyas

**SEKRETARIAT**

Endang Dwi Astuti

Effendi, S.Sos

Bowo Hoetomo, S.IP.

Hilda Kurnia Ningsih, S.H.

Diah Ayu Nuryanti, S.E.

Lita Puspita

Muhamad Aaqil Imama



REKOMENDASI PANJA  
BKSAP TAHUN 2015  
DALAM MENGHADAPI

# MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

CETAKAN KEDUA

Badan Kerja Sama Antar Parlemen  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Tahun 2015

# DAFTAR ISI

- 8 Sekapur Sirih Wakil Ketua DPR RI  
Bidang Politik dan Keamanan
- 10 Kata Sambutan Ketua Badan  
Kerja Sama Antar Parleman
- 12 Susunan Keanggotan  
Panitia Kerja

## 15

### I. Pendahuluan

- 16 A. Latar Belakang Pembentukan  
Panja Masyarakat Ekonomi Asean
- 18 B. Selayang Pandang  
Masyarakat Ekonomi Asean
- 22 C. Persiapan Indonesia Dalam  
Menghadapi Integrasi Ekonomi Kawasan

## 25

### II. BKSAP Dan Telaah Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA 2015

- 29 Industri kreatif dan Integrasi Kawasan:  
Beberapa Praktik Cerdas
- 29 A. Ekonomi Kreatif menyumbangkan  
10 persen dari GDP Thailand
- 34 B. Belajar dari industri kreatif di Tiongkok



41

### III. Rekomendasi

42

A. Infrastruktur

44

B. Sumber Daya

45

C. Pembiayaan/Pendanaan

46

D. Perangkat Hukum

48

E. Strategi Pemasaran dan Perluasan Akses Pasar

50

F. Ringkasan Rekomendasi

53

### IV. Lampiran Laporan Kunjungan Panitia Kerja



## Sekapur Sirih Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Bulan Desember 2015 ini menjadi bulan yang bersejarah bagi ASEAN. Pengejawantahan visi *One Nation, One Identity, One Community* menjadi semakin nyata di akhir tahun ini dengan terealisasinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan kekuatan gabungan PDB mencapai 2,3 triliun dolar AS di tahun 2013, maka ASEAN merupakan ekonomi terbesar ketiga di Asia setelah Jepang dan Tiongkok. Diprediksi PDB ASEAN tersebut akan tumbuh melampaui 3 triliun dolar di tahun 2016, menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan.

MEA merupakan cita-cita kolektif yang tercantum dalam visi 2020. Mengingat peluang yang dimiliki ASEAN, maka tidak dipungkiri ada banyak justifikasi untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi bersama. Namun demikian dalam pelaksanaannya, negara-negara anggota tetap harus berpegang teguh pada prinsip *open market, outward looking, dan market driven economy* sebagaimana digarisbawahi dalam visi 2020.

Indonesia memiliki komitmen kuat untuk meleburkan diri dalam satu komunitas ASEAN. Sebagai negara yang sangat diperhitungkan di kawasan, negara-negara anggota ASEAN segan pada kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Selain itu ASEAN merupakan *cornerstone* dari politik luar negeri Indonesia di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Indonesia pula, MEA yang implementasinya semula dijadwalkan bersamaan dengan dua pilar Masyarakat ASEAN lainnya, Masyarakat Politik Keamanan dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, dimajukan lebih awal menjadi 2015.

Dalam Siaran Pers setelah menghadiri Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Ke-13 di Kuala Lumpur, Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa sampai kuartal pertama tahun 2015 Indonesia telah mencapai lebih dari 90 persen implementasi AEC *Blueprint* sebagaimana terindikasi dalam ASEAN *Economic Community Scorecard*.

Hal ini semakin menegaskan keoptimisan pemerintah akan kesiapan Indonesia dalam menuju MEA di akhir tahun 2015. Dalam berbagai rapat antara pemerintah dan DPR RI, terdapat kesan bahwa pemerintah telah siap untuk mengikatkan diri dalam pasar bersama yang ditandai aliran perdagangan barang, jasa, tenaga kerja dan modal.

Tetapi apakah rasa percaya diri di level elit tersebut paralel dengan optimisme masyarakat di arus bawah? Dengan demikian menjadi tugas anggota DPR RI untuk mencari fakta di lapangan. Karakteristik anggota parlemen yang mampu melebur ke semua kalangan membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terutama masyarakat yang menjadi konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Hasil dialog tersebut kemudian di *cross-check* dengan hasil pembahasan-pembahasan dengan mitra kerja di ruang-ruang rapat kerja di Senayan.

Oleh karena itu saya menyambut baik pembentukan Panja Kerja Sama Antar Parlemen Dalam Menghadapi Komunitas ASEAN 2015 di bawah koordinasi Badan



Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. Panja yang terdiri dari anggota DPR RI lintas fraksi lintas komisi memiliki peluang untuk melakukan fungsi pengawasan melalui eksplorasi isu-isu spesifik seperti MEA ini.

Panja ini memiliki keunikan pula karena sebagai ujung tombak diplomasi parlemen, BKSAP dapat menelaah implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dari perspektif kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan organisasi-organisasi parlemen regional dan internasional. Memastikan kesepakatan tersebut mengakomodasi kepentingan Indonesia dan sejauh mana kesepakatan tersebut diterjemahkan ke dalam legislasi dan kebijakan di dalam negeri. Di kawasan Asia Tenggara, DPR RI telah berperan sangat aktif dalam organisasi parlemen negara-negara anggota ASEAN yaitu *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*.

Dengan publikasi rekomendasi yang disusun oleh Panja ini, saya mengharapkan upaya 'membangkitkan' MEA melalui peningkatan *awareness* akan MEA di kalangan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, dapat menjadi pertimbangan bagi Komisi-Komisi terkait di DPR RI dalam menyusun legislasi dan masukan bagi unit-unit terkait di eksekutif dalam menyusun kebijakan strategis yang mendukung daya saing industri dalam negeri.

Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaatnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 14 Desember 2015

**Fadli Zon, S.S., M.Si.**

Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan



## Kata Sambutan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parleman

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menuntaskan pelbagai program Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPR RI yang digawangi Badan Kerja Sama Antar Parlemen.

Sejak pembentukan Panja MEA pada Januari 2015, semua program yang direncanakan sampai akhir tahun 2015 berhasil dilaksanakan. Program-program tersebut terfokus kepada pengembangan ekonomi kreatif dengan harapan dapat menstimulasi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penggerak dan stabilisator sosial-ekonomi nasional.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pentingnya pengembangan sektor ekonomi kreatif yang lantas diterjemahkan ke dalam Instruksi Presiden No. 6/2009.

Program-program Panja yang berhasil dilaksanakan berbentuk rapat-rapat dengan kementerian/pihak-pihak relevan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN; mengadakan kunjungan kerja di dalam dan di luar negeri; menyelenggarakan seminar/workshop tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan menerbitkan Buku tentang Peran Parlemen dalam pelaksanaan Masyarakat ASEAN yang di dalamnya mencakup Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diharapkan, melalui rangkaian program tersebut dapat memenuhi target dan tujuan pembentukan Panja.

Sekadar mengingatkan, Panja MEA ini tujuan utamanya adalah, pertama pada level nasional, sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu bagi Anggota Panitia Kerja dalam kerangka dukungan substantif perumusan legislasi dan mekanisme pengawasan demi menjamin implementasi efektif Masyarakat Ekonomi ASEAN dan memberikan saran/rekomendasi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN kepada pihak eksekutif/pemerintah. Kedua, secara regional, untuk menggalang kerjasama dengan Anggota Parlemen ASEAN lainnya untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai bagian dari komitmen AIPA terhadap implementasi resolusi-resolusi yang dihasilkannya.

BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) -yang selain mandat utamanya sebagai perumus undang-undang, penganggaran dan pengawasan- juga bertugas mengurus diplomasi parlemen. Dalam kaitan tersebut BKSAP diharapkan memfasilitasi ruang dialog isu-isu global atau regional dalam kerangka kepentingan nasional di antaranya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (*ASEAN Economic Community/AEC*) pada 1 Januari Tahun 2016.

Berangkat dari tugas dan wewenang yang dimandatkan undang-undang kepada BKSAP, kami berupaya mengerahkan daya dan pikiran demi kesiapan Indonesia menghadapi implementasi MEA di awal tahun 2016 yang dinilai sebagai babak baru kesepakatan era perdagangan bebas regional (*regional free trade agreement*) dengan tantangan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Kendatipun tingkat daya saing Indonesia pada level global dapat dikatakan cukup lumayan (peringkat 34 dari 144 negara menurut *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2014-2015*), namun di kawasan ASEAN, peringkat daya saing Indonesia masih kalah dibandingkan dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat 31.

Variabel lain yang tak boleh diabaikan adalah peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator tingkat sumber daya manusia (*human capital*). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2014 nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan tipis menjadi 68,90 dari 68,4 pada 2013.

IPM 2013 berada di peringkat ke 108 dari 187 negara. Angka IPM ini menandakan bahwa nilai Indonesia masih jauh di bawah rata-rata sejumlah negara di ASEAN. Peringkat Indonesia di ASEAN di posisi lima berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand.

Merujuk kepada tingkat daya saing dan IPM Indonesia dalam konteks ASEAN di atas, seluruh komponen bangsa dituntut bersinergi untuk berkontribusi dalam mempromosikan kesiapan Indonesia menyongsong era persaingan perdagangan bebas ASEAN. Sebagai negara dengan penduduk terbesar dan wilayah terluas di kawasan, Indonesia sejatinya menjadi *key player* bukan sebagai penonton. Dalam konteks inilah Panja MEA dihadirkan.

Melalui rangkaian program Panja MEA sepanjang tahun 2015, inilah rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan berkontribusi dalam kesiapan Indonesia meraih kesuksesan peluang era perdagangan bebas ASEAN. Inilah hasil kerja keras rekan-rekan kami di Panja. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua anggota Panja dan pihak-pihak yang berperan dalam kesuksesan kerja-kerja Panja. Semoga hasil-hasil Panja ini bermanfaat.

*Wassalaamuallaikum Warahmatullaahi wa baraakaatuh.*

Jakarta, 15 Desember 2015



**Dr. Nurhayati Ali Assegaf**  
Ketua BKSAP DPR RI 2014-2019

**SUSUNAN PANITIA KERJA  
KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DALAM MENGADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

---

**H. A. Hanafi Rais, S.IP, MPP**

*Ketua Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Wakil Komisi I / F-PAN*

**Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc**

*Wakil Ketua Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi I / F-P.Gerindra*

**Hj. Kartika Yudhisti, B. Eng, M.Sc**

*Sekretaris Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi I / F-PPP*

**Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si**

*Anggota Panitia Kerja, Ketua BKSAP / Komisi I / F-PD*

**Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si**

*Anggota Panitia Kerja, Wakil Ketua BKSAP / Komisi X / F-PAN*

**H. Rofi Munawar, Lc**

*Anggota Panitia Kerja, Wakil Ketua BKSAP / Komisi IV / F-PKS*

**Drs. Yosep Umar Hadi, M.Si**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi I / F-PDIP*

**Herman Herry**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi I / F-PDIP*

**Drs. Effendi M. S. Simbolon, M.I.Pol**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi I / F-PDIP*

**Ir. Nazarudin Kiemas**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VII / F-PDIP*

**Sudin, SE**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VI / F-PDIP*

**Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VI / F-PG*

**Pdt. Elion Numberi, STH**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi V / F-PG*

**Betti Shadiq Pasadigoe, SE, AK, MM**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VI / F-PG*

**H. Indro Hananto**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VII / F-PG*

**Mohamad Hekal, MBA**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VI / F-P.Gerindra*

**Ir. H. Sultan Adil Hendra, MM**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi X / F-P.Gerindra*

**Ir. Sumail Abdullah**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi XI / F.P.Gerindra*

**Sartono, SE, MM**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VI / F-PD*

**Hj. Melani Leimena Suharli**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VI / F-PD*

**Dra. Hj. Siti Masrifah, MA**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi X / F-PKB*

**Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi I / F-PKB*

**H. Mahfudz Abdurrahman**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi V / F-PKS*

**DR. H. Zulkieflimansyah, M.Sc**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi XI / F-PKS*

**H. Andi Muhammad Ghalib, SH, MH**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi I / F-PPP*

**Prananda Surya Paloh**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi I / F-P.Nasdem*

**Dewie Yasin Limpo, SE**

*Anggota Panitia Kerja, Anggota BKSAP / Komisi VII / F-P.Hanura*







# I. PENDAHULUAN

---



## A. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PANJA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

---

Panitia Kerja Sama Antar Parlemen Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Panja MEA) berada di bawah koordinasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai suatu alat kelengkapan DPR RI yang diberi mandat untuk mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain<sup>1</sup>.

Dalam hal ini, menyadari adanya kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama di kawasan, dan tentunya kebutuhan untuk dapat menjalin komunikasi, kerjasama dan berbagi pengalaman dengan negara-negara ASEAN lainnya didalam membantu dan mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mengimplementasikan *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA).

Pembentukan Panja MEA merupakan salah satu upaya untuk memberikan kontribusi terhadap penyusunan dan implementasi strategi nasional dalam menghadapi MEA. Salah satu isu yang menjadi fokus studi BKSAP adalah pengembangan usaha UMKM dan sektor industri kreatif di Indonesia melalui kegiatan diplomasi parlementer.

---

<sup>1</sup> Tentang Badan Kerja Sama Antar Parlemen - Diakses dari <http://dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen>

BKSAP dalam hal ini merupakan pelaksana diplomasi DPR RI yang dalam prakteknya bekerja sama dengan berbagai forum antar-parlemen untuk menyuarakan kepentingan Indonesia di tingkat internasional serta mendorong implementasi kebijakan yang telah disetujui secara global di level nasional.

Panja MEA yang dibentuk BKSAP juga menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia dengan cita-cita integrasi regional. Keterlibatan BKSAP DPR RI dalam forum ASEAN *Inter Parliamentary Assembly* (AIPA) merupakan salah satu perwujudan dari upaya tersebut.

DPR RI sebagai salah satu *founding father* AIPA memiliki keinginan yang kuat untuk mendukung proses integrasi regional, namun hal tersebut juga tidak boleh berlawanan dengan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Melalui AIPA, DPR RI menyetujui sejumlah Resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing masyarakat ASEAN dalam kerangka kerja sama regional.

Resolusi AIPA RES.35GA/2014/ECO/02 tentang **Meningkatkan Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan dalam Proses Menurunkan Kesenjangan Pembangunan di ASEAN** menjelaskan tentang kesenjangan dalam dukungan politik, kemampuan dan akses terhadap kebutuhan finansial, kebijakan yang mendorong peningkatan jumlah wirausaha muda dan perempuan, serta kendala dalam kerja sama regional yang memengaruhi perkembangan kewirausahaan di ASEAN.

Resolusi AIPA RES.32GA/2011/ECO/01 tentang **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Menurunkan Kesenjangan Pembangunan di ASEAN** menggarisbawahi bahwa ekonomi

komunikatif akan memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa, serta akan turut meminimalkan kesenjangan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan.

Resolusi AIPA RES.30GA/2009/ECO/01 tentang **Integrasi Ekonomi Regional** memerlukan dukungan parlemen menuju integrasi ASEAN melalui fasilitasi arus barang, jasa, dan tenaga kerja terampil yang bebas hambatan.

DPR RI telah mengidentifikasi peran ekonomi kreatif sebagai landasan dasar daya saing Indonesia di kawasan. Berdasarkan informasi Kementerian Perdagangan RI, industri kreatif di Indonesia mencakup 14 sub-sektor yang terdiri dari (1) periklanan, (2) arsitektur, (3) kesenian dan barang antik, (4) kerajinan, (5) desain, (6) busana, (7) video, film, dan fotografi, (8) game interaktif, (9) musik, (10) seni pertunjukan, (11) percetakan dan publikasi, (12) komputer dan perangkat lunak, (13) televisi dan radio, dan (14) penelitian dan pengembangan.

Sebagai pemegang mandat legislasi, penganggaran dan pengawasan, DPR RI sangat menyadari bahwa keterlibatan parlemen dalam implementasi MEA penting artinya bagi masa depan integrasi regional yang menjamin terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, melalui kegiatan Panja MEA diharapkan DPR RI dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesiapan

UMKM khususnya UMKM industri kreatif Indonesia dan negara ASEAN lainnya dalam menghadapi implementasi MEA 2015.

## B. SELAYANG PANDANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN<sup>2</sup>

Sebagai kesepakatan KTT ASEAN tahun 2007 di Singapura, negara-negara ASEAN mengesahkan *ASEAN Economic Community Blueprint 2015* bersamaan dengan penandatanganan *ASEAN Charter*.

Terdapat 12 sektor perekonomian yang diprioritaskan dalam MEA, yaitu: 7 sektor barang dan 5 sektor jasa-jasa. Sektor tersebut adalah (1) *Agro-based products*, (2) *Air travel*, (3) *Automotive*, (4) *E-ASEAN*, (5) *Electronics*, (6) *Fisheries*, (7) *Healthcare*, (8) *Rubber-based products*, (9) *Textiles & apparels*, (10) *Tourism*, (11) *Wood-based products*, (12) *Logistics Services*. Perdagangan intra dan ekstra ASEAN harus terus berkembang untuk menjaga identitas ASEAN sebagai satu-satunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara.

Keinginan ASEAN membentuk *Asean Economic Community* (AEC) atau dikenal dengan MEA didorong oleh perkembangan eksternal dan internal kawasan. Dari sisi eksternal, kawasan Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Sedangkan secara internal, kekuatan ekonomi ASEAN sampai tahun 2013 telah menghasilkan GDP sebesar US\$ 3,36 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 5,6 persen dan memiliki dukungan jumlah penduduk 617,68 juta orang.

Sejalan dengan pesatnya dinamika hubungan antar-bangsa di berbagai kawasan, ASEAN menyadari pentingnya integrasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN, maka disusunlah *MEA Blueprint* yang memuat empat pilar utama yaitu:

- A. **ASEAN** sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
- B. **ASEAN** sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce;
- C. **ASEAN** sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan
- D. **ASEAN** sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara yang penerapannya mengacu pada MEA Blueprint.

Sebagai kesatuan parlemen di kawasan Asia Tenggara, AIPA senantiasa berpijak pada cita-cita untuk menjadi mitra strategis ASEAN dalam pencapaian tujuan regional, yakni mewujudkan Komunitas ASEAN yang berdasar pada tiga pilar: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

<sup>2</sup> Bank Dunia, 2005, "Mendukung Usaha Kecil dan Menengah", Policy Brief. Diakses dari <http://www.worldbank.or.id>



Dalam proses menuju integrasi ASEAN, AIPA memiliki peranan penting, yaitu sebagai katalisator, dinamisator, dan mediator. AIPA yang awal mulanya dibentuk sebagai *ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)* didirikan atas inisiatif Indonesia.

Pada awal 1970-an, DPR-RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang terdiri dari parlemen-parlemen negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Ide tersebut mendapat sambutan yang positif dari Parlemen Malaysia dan Singapura. Setelah melalui sejumlah pertemuan, AIPO secara resmi didirikan pada 2 September 1977. Selanjutnya, parlemen negara-negara ASEAN lainnya turut bergabung dalam AIPO.

AIPO telah memainkan peran penting dalam mencapai sasaran dan tujuan bersama. Seiring berjalannya waktu, tantangan-tantangan dan peluang terus bermunculan di kawasan ASEAN dan menuntut adanya penyesuaian keorganisasian agar AIPO dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

Selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi Sidang Umum ke-27 AIPO, para negara anggota AIPO dalam *Extra Ordinary Meeting of the Executive Committee* yang diadakan pada bulan April 2007 di Kuala Lumpur, menandatangani Statuta AIPA. Sebagaimana tercantum dalam Statuta AIPA tersebut yang bertujuan untuk:

**A.** Meningkatkan solidaritas, saling pengertian, kerjasama dan hubungan yang erat antar negara anggota, observer dan organisasi parlemen lainnya;

**B.** Mendukung tercapainya tujuan ASEAN sebagaimana tercantum dalam ASEAN Declaration Agustus 1967 dan ASEAN Vision 2020;

**C.** Melakukan pertukaran dan penyebaran informasi serta koordinasi, interaksi, dan konsultasi dengan ASEAN;

**D.** Menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan dan kesejahteraan di kawasan ASEAN.

Integrasi regional yang diawali dengan pembentukan MEA akan memberikan kebebasan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil. MEA juga akan membuka berbagai kesempatan baru bagi para pelaku usaha untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan angka penjualan secara signifikan. Namun, tantangan yang akan timbul pun akan semakin kompleks. Iklim kompetisi di kawasan ASEAN akan semakin meningkat. Para pelaku usaha domestik tidak hanya akan bersaing dengan sesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga para pengusaha dari negara lain yang berupaya untuk merebut pasar domestik.

Prosedur ekspor-impor akan semakin mudah dan dengan diberlakukannya *zero tariff* maupun *non-tariff barrier*, para pengusaha domestik yang belum memiliki wawasan regional akan terkena dampak dari serbuan produk impor.

Apabila produk lokal memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan produk impor, para pengusaha lokal pun akan sulit untuk bertahan dalam era liberalisasi perdagangan.

Tantangan lainnya adalah bagi para pekerja profesional, misalnya perawat. Dengan kebebasan arus tenaga kerja terampil, Sumber Daya Manusia yang lebih kompetitif akan



menguasai perolehan lapangan kerja. Perawat di Indonesia akan bersaing dengan perawat dari negara ASEAN lainnya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan menghasilkan. Di sinilah kita perlu mengevaluasi, tidak hanya kesiapan para pengusaha lokal, tetapi juga kesiapan para profesional dalam menghadapi MEA.

Rendahnya daya saing serta iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung pengusaha lokal, terutama yang bergerak dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia. UMKM di Indonesia sejauh ini masih digunakan sebagai instrumen kebijakan sosial atau kebijakan untuk mengurangi pengangguran atau kemiskinan.

UMKM belum dilihat sebagai kelompok bisnis murni. Menghadapi persaingan pasar bebas seperti MEA, perlakuan terhadap UMKM sudah waktunya diubah. Pemerintah dan DPR sudah waktunya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha UMKM agar mampu bersaing didalam MEA dimasa mendatang.

Menurut Bank Dunia (2005), UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2005, UMKM di Indonesia mampu menyerap 77.678.498 orang atau sebesar 96,77 persen dari total tenaga kerja

yang mampu diserap oleh usaha skala kecil, menengah, dan besar.

Dari sisi jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang mampu diserap maka UMKM jauh lebih besar dari usaha besar. Di sisi lain, dalam hal penciptaan nilai tambah bagi PDB maka Usaha Besar (UB) jauh lebih besar daripada UMKM.

Dengan 57,9 juta pelaku UMKM, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki pelaku UMKM di antara negara-negara anggota ASEAN.

Untuk tingkat ASEAN, sebanyak 96 persen perusahaan di Indonesia bergerak di sektor UMKM dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) antara 30-57 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja antara 50-98 persen. Berlakunya MEA 2015 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia. Karena itu peningkatan daya saing UMKM menjadi faktor kunci agar mampu menghadapi tantangan dan peluang dari implementasi MEA 2015.

Sementara di sisi lain, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia semakin banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Sejak diterbitkannya Inpres No. 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada kreativitas individu dan komunitas masyarakat luas semakin berkembang.



Hal ini semakin dikukuhkan dengan keberadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang memulai kiprahnya pada 19 Oktober 2011, serta Badan Ekonomi Kreatif (BEK) yang dibentuk sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015.

Namun, sampai sejauh ini perkembangan ekonomi kreatif di Tanah Air belum banyak menunjukkan perkembangan yang berarti karena masih banyak kendala bagi pengembangannya di masa depan.

Selain minimnya kebijakan yang terintegrasi, upaya pengembangan potensi ekonomi kreatif juga terkendala persoalan HKI yang belum kompatibel dengan pengelolaan karya artistik dan peninggalan budaya tradisional, modal finansial yang terbatas, infrastruktur dasar yang kurang memadai, lemahnya upaya promosi dan pemasaran, serta pengembangan modal sosial, budaya, dan pengetahuan yang minim.

Industri kreatif domestik juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Memasuki era pasar bebas ASEAN akhir 2015, industri kreatif dalam negeri harus bersaing dengan produk-produk impor dengan harga dan kualitas yang kompetitif, khususnya produk-produk dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam persaingan industri kreatif ASEAN, Thailand dan Vietnam kerap disebut memiliki karakteristik paling serupa dengan Indonesia.

Berbeda dengan Singapura yang memiliki kekuatan di bidang teknologi dan Malaysia yang seimbang dalam hal teknologi serta inovasi budaya. Tantangan lain juga muncul karena dari sepuluh negara anggota ASEAN, baru Malaysia, Singapura, dan Thailand yang memberikan insentif bagi perkembangan industri kreatif.

Dukungan sangat diperlukan bagi perkembangan industri kreatif karena industri kreatif tidak bisa berkembang secara mandiri dan terpisah dari sektor-sektor yang lain. Industri kreatif saling mendukung dan berkolaborasi dengan sektor-sektor yang lain, mulai dari sektor pendidikan, teknologi, perdagangan, pariwisata, hankam, politik, sosial dan budaya. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki kompleks industri kreatif, baik dari kegiatan produksi maupun pemasaran.

Pemerintah perlu membangun suatu kompleks dan fasilitas industri kreatif, dimana masing-masing aktor dan unsur industri kreatif akan secara mudah saling berkolaborasi dan mudah pula mempertemukan produsen-konsumen industri kreatif.

## C. PERSIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI INTEGRASI EKONOMI KAWASAN

Melalui MEA, perekonomian Indonesia diharapkan akan meningkat. Salah satunya melalui aktifitas pemasaran barang dan jasa yang lebih luas. Pangsa pasar ASEAN dengan populasi sekitar 625 juta jiwa tentu saja jauh lebih besar dibandingkan pangsa pasar domestik yang berjumlah 250 juta orang. Apabila diiringi dengan daya saing yang lebih kompetitif, Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai ekspor secara signifikan. SDM Indonesia yang berkualitas juga akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di negara-negara ASEAN lainnya.

Bagi para investor, MEA akan membuka ruang investasi yang lebih terbatas. Indonesia juga dapat lebih mudah menarik investasi dari para investor ASEAN. Iklim kompetisi yang meningkat akan memaksa para pengusaha lokal untuk semakin kreatif. Para profesional akan terpacu untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian yang dimilikinya.

Namun, Indonesia masih dihadapi oleh sejumlah hambatan, antara lain kualitas pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Pada 2014, sebanyak 76,4 juta jiwa atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia berpendidikan SMP atau lebih rendah.<sup>3</sup> Hambatan berikutnya adalah kurangnya fasilitas dan ketersediaan infrastruktur.

*Global Competitiveness Index (GCI) 2014* menempatkan kualitas infrastruktur Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Hambatan lain-nya adalah ketergantungan terhadap impor bahan baku dan setengah jadi, serta keterbatasan pasokan energi.

Indonesia menargetkan nilai ekspor 2015 sebesar US\$192,5 milyar, namun nilai ekspor Indonesia periode Januari-November 2015 hanya mencapai US\$138,42 milyar atau menurun 14,32% dibanding periode yang sama tahun 2014. Selain disebabkan oleh instabilitas situasi ekonomi global, penurunan ini juga disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang terus merosot dan tingginya harga bahan baku impor.

Di era globalisasi, dampak perekonomian global terhadap situasi perekonomian domestik tidak dapat dikesampingkan. Begitu pula halnya dengan mekanisme kerja sama ekonomi di tingkat regional. Baik dampak negatif maupun positif dari mekanisme tersebut harus dicermati secara seksama.

Untuk mengurangi dampak negatif MEA, Indonesia harus memperkuat daya saing sektor industri domestik, termasuk di antaranya para pengusaha besar, sektor UMKM, dan sektor industri kreatif. Bagi sektor UMKM, peningkatan daya saing dapat dilakukan melalui penggunaan kemasan, sertifikasi halal, dan pendaftaran merek dagang. Hal ini merupakan amanat dari

3 G.T. Suroso. *MEA dan Perekonomian Indonesia*. Widyaiswara BPPK.  
Diakses dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia>

4 Apriyani. *Neraca Perdagangan RI Defisit US\$346,4 Juta*. Diakses dari <http://infobanknews.com/neraca-perdagangan-ridefisit-us3464-juta/>



UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Persiapan menghadapi MEA telah benar-benar direalisasikan oleh DPR RI melalui penyusunan sejumlah instrumen kebijakan. UU No.7/2014 tentang Perdagangan yang telah disahkan sejak 2014 sebagai upaya untuk melindungi pelaku usaha domestik dari tantangan regionalisme. UU Perdagangan tidak hanya mencakup perdagangan barang, tetapi juga perdagangan sektor jasa.

MEA dapat mempermudah produk Indonesia untuk dipasarkan di luar negeri, tetapi juga mengancam keberadaan produk asli Indonesia, terutama produk-produk yang belum dipatenkan atau didaftarkan sebagai hak cipta kekayaan intelektual (HAKI).<sup>4</sup>

Ancaman terbesar terkait hak cipta akan dialami oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri kreatif. Sebagian HAKI di Indonesia memang berkaitan dengan kreativitas dan bakat kemanusiaan. Oleh karena itu, DPR merumuskan UU No.28/2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti UU No.19/2002. UU yang baru membahas mengenai isu pembajakan, yaitu adanya hukuman pidana 10 tahun bagi pembajak.

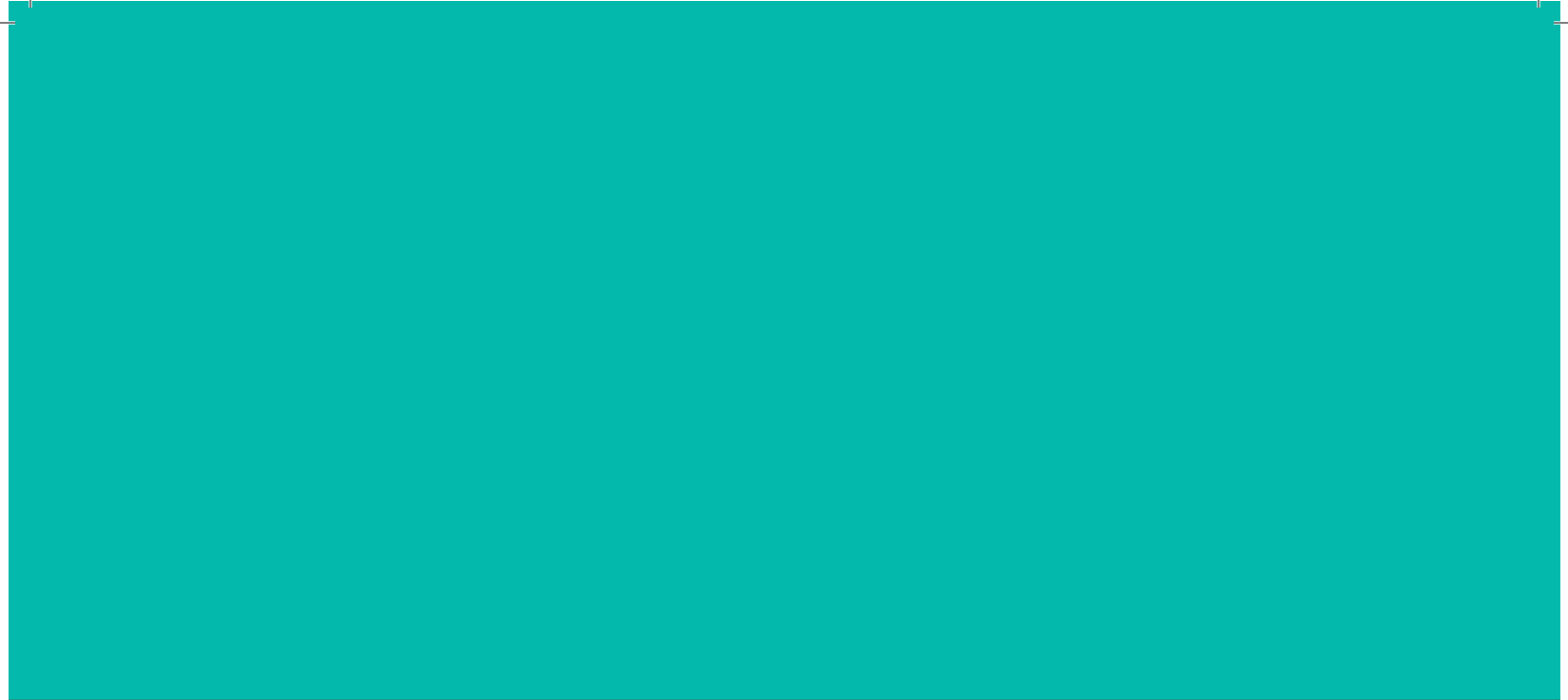
DPR juga telah mengesahkan UU No.20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. UU ini membahas mengenai pengembangan

standar oleh para pemangku kepentingan, penerapan SNI untuk melindungi rakyat Indonesia dan peningkatan daya saing produk nasional agar dapat bersaing di pasar global.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan peningkatan kualitas SDM profesional, DPR juga telah menyusun dan mensahkan sejumlah UU, antara lain UU No.11/2014 tentang Keinsinyuran; UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan; UU No.29/2004 tentang Praktek Kedokteran; UU No.38/2014 tentang Keperawatan; UU No.5/2011 tentang Akuntan Publik; dan UU No.10/2009 tentang Kepariwisata. Sementara itu, RUU Kearsitekturan masih dalam tahap pembahasan.

<sup>4</sup> *Republika*. MEA Ancam HAKI. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/14/10/30/ne8zk42-masyarakat-ekonomi-asean-ancam-haki>

<sup>5</sup> *LPK Indonesia Siap Menghadapi MEA*. Diakses dari [http://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/6721/LPK-Indonesia-Siap-Menghadapi-MEA](http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/6721/LPK-Indonesia-Siap-Menghadapi-MEA)





## **II. BKSAP DAN TELAAH KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI MEA 2015**

---



Indonesia sebagai salah satu *founding father* ASEAN, tentunya harus bisa memanfaatkan peran kepemimpinan di kawasan dan harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas serta memberikan kontribusi untuk menjamin kesuksesan integrasi regional. Dengan implementasi pasar bersama kawasan melalui MEA, maka kita perlu mengetahui sejauh mana kesiapan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, dalam menghadapi berbagai potensi dan tantangan regionalisme ekonomi.

Untuk menunjang kerja Panja MEA, BKSAP menghimpun masukan dari berbagai pihak. Salah satunya melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Selain untuk menghimpun masukan, FGD diselenggarakan untuk menginisiasi pembentukan Panja.

Tiga pembicara dihadirkan dalam FGD yaitu *Deputy Secretary of ASEAN for Community and Corporate Affairs Department*, **Dr. AKP Mochtan Ph.D**; Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia, **Prof. Hikmahanto Juwana SH, LL.M, Ph.D**; dan Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **Ina Hagniningtyas Krisnamurthi**.

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari FGD adalah:

- 1.** Pembentukan Komunitas ASEAN merupakan proses yang irreversible dan tidak dapat ditunda. Liberalisasi perdagangan dan investasi menjadikan ASEAN sebagai pasar bersama untuk mitra di luar ASEAN dan diharapkan tidak menjadikan persaingan diantara negara ASEAN semakin meningkat. Masih terdapat gap namun menunda bukan merupakan opsi karena terkait dengan kredibilitas bangsa.
- 2.** Diakui bahwa Indonesia masih belum memiliki kesiapan penuh yang ditunjukkan dengan scorecard 85% dan pekerjaan rumah 102 measures yang belum diimplementasikan. Selain itu kesiapan pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan terutama disebabkan kurangnya penyebaran dan sosialisasi informasi ke daerah mengenai perjanjian internasional yang telah diratifikasi pemerintah pusat.
- 3.** Terkait ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), Indonesia telah memiliki UU Ketenagakerjaan, UU Imigrasi dan UU Investasi (yang pada saat pembahasan tengah dalam proses revisi) yang menjamin perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja intra ASEAN.
- 4.** Panja MEA dinilai bermanfaat sebagai upaya sosialisasi MEA dan meningkatkan kesadaran terutama di level akar rumput. Selain itu Panja dapat menjadi sarana komunikasi antara anggota DPR RI dengan anggota parlemen negara-negara ASEAN.

## 5.

*Exit strategy* yang mungkin diadopsi antara lain MEA tetap dijalankan pada tahun 2015 namun Indonesia tetap menjalankan *business-as-usual* dan mampu mengelola ekspektasi Malaysia dan Singapura; atau penundaan MEA pada tahun 2020 namun Indonesia harus memastikan semua pekerjaan rumah telah selesai pada tahun 2020.

Selanjutnya, BKSAP juga melaksanakan konsinyering untuk mendapatkan masukan dari para pakar dan narasumber mengenai kesiapan dan daya saing Indonesia dalam menghadapi MEA. Konsinyering menghadirkan empat pembicara kunci, yaitu Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, **Harry Waluyo**; Pembina UKM Center FE UI, **Nining Indroyono Soesilo**; Staf Ahli Menlu Bidang Ekososbud, **Wahid Supriyadi**; dan Pelaku Industri Kreatif, **Yoris Sebastian**.

---

Dalam hal ini, Panja menyimpulkan beberapa masukan sebagai hasil konsinyering, yaitu:

### 1.

Ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam menghadapi MEA 2015 dan dapat menjadi motor bagi peningkatan daya saing nasional di level ASEAN.

### 2.

Dari segi kreatifitas dan kualitas, pelaku industri kreatif dalam negeri sudah layak bersaing dalam kerangka kerja sama regionalisme, namun ada beberapa hambatan yang masih mereka hadapi, antara lain persoalan hak paten regional dan kurangnya ketersediaan data dan informasi.

### 3.

Perlunya atase ekonomi kreatif di kedubes RI. Berbagai catatan yang diterima Panja melalui FGD dan konsinyering kemudian diuji di lapangan melalui kunjungan kerja. Bali dipilih sebagai lokasi kunjungan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah tersebut, terutama dari sub-sektor industri kreatif, dalam menghadapi MEA.

Dalam kunjungan tersebut, Panja melakukan dialog dengan stakeholders setempat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Pengurus Kadin Provinsi Bali.

Melalui dialog ini, anggota Panja menggali informasi dan data mengenai industri kreatif terutama jasa pariwisata di Bali, serta melakukan tanya jawab untuk menelaah kesiapan daerah dalam mengelola persaingan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara menyusul pemberlakuan MEA 2015.

Salah satu upaya meningkatkan kesiapan nasional menghadapi MEA, telah dibentuk Bali Creative Industry Centre (BCIC) yang merupakan pusat promosi dan pengembangan industri kreatif nasional. BCIC mengumpulkan lulusan sekolah menengah vokasi terkait subsektor ekonomi kreatif Putra-putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia ini kemudian dididik menjadi tenaga terampil siap kerja. Selain itu BCIC bertindak pula sebagai penghubung antara tenaga kerja siap pakai dengan industri yang membutuhkan.

Dalam kunjungan lapangan, Panja berkesempatan untuk melakukan dialog langsung dengan pelaku industri kreatif di Gianyar. Gianyar dipilih dengan mempertimbangkan posisi kabupaten tersebut yang telah mendapatkan sertifikasi kompeten dalam bidang pariwisata dari BNSP. Pengembangan industri kreatif di Bali dalam hal ini sangat terkait dengan industri pariwisata, ataupun sengaja diintegrasikan dengan bidang pariwisata selayaknya industri kreatif di Thailand.

Kunjungan lapangan Panja menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

**1.**

Pemerintah daerah Bali telah memiliki *awareness* yang tinggi akan implementasi MEA dan telah mempersiapkan diri untuk menghadapi arus barang, jasa dan tenaga kerja dari sesama negara ASEAN. Pemda Bali juga telah meningkatkan dukungan infrastruktur dengan penyediaan sarana prasarana pariwisata, pembangunan Bandara Bali Utara dan akses tol yang menghubungkan Bali Utara dengan Selatan dan Bali Barat dengan Timur. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan visi percepatan pembangunan dan untuk menjembatani ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Bali.

**2.**

Mengingat tradisi dan budaya yang adiluhung merupakan keunggulan komparatif Bali, DPRD setempat mengusulkan UU terkait pariwisata dan industri kreatif yang menitikberatkan pada perlindungan kearifan lokal. Termasuk di dalamnya UU yang mewajibkan tenaga kerja asing untuk memiliki pemahaman akan budaya lokal. UU ini akan dapat diterapkan secara nasional mengingat Indonesia memiliki kekayaan ragam tradisi dan budaya.

**3.**

Pelaku usaha (kreatif) di Bali mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi antara lain terkait kualitas SDM UMKM, terbatasnya skema pembiayaan berbunga rendah, dan regulasi yang belum memiliki kesamaan persepsi sehingga membingungkan pelaku usaha. Selain itu dikeluhkan pula mengenai tarif pajak, bea operasional terkait tarif listrik, bahan baku yang masih harus didatangkan dari luar negeri dan serbuan produk-produk impor terutama dari Tiongkok. Dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan persaingan regional, KADIN Bali telah melakukan beberapa upaya parsial antara lain standardisasi produk barang dan jasa serta standardisasi keahlian SDM.

**4.**

Terkait mandat BKSAP untuk melakukan diplomasi parlemen termasuk diplomasi ekonomi, para pelaku usaha di Bali berharap BKSAP dapat mengkomunikasikan secara intensif kepentingan pelaku usaha kreatif Indonesia di kawasan ASEAN melalui AIPA.

Selain itu, Pemda dan DPRD setempat menyampaikan pula masukan untuk revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsep dana perimbangan yang menekankan pada penerimaan daerah dari sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan gas bumi. Bali sebagai daerah yang memiliki potensi terbesar dari sektor jasa pariwisata menginginkan rasionalisasi pola perundangan sehingga besaran dana perimbangan yang diterima sesuai dengan kontribusi sektor pariwisata Bali.

# INDUSTRI KREATIF DAN INTEGRASI KAWASAN: BEBERAPA PRAKTIK CERDAS

## Ekonomi Kreatif menyumbangkan 10 persen dari GDP Thailand

Perkembangan ekonomi kreatif di Thailand telah lama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional periode 2012 - 2016. Thailand termasuk ke dalam 20 negara di dunia yang mengekspor produk dari sektor ekonomi kreatif.

Penggerak utama bagi perkembangan industri kreatif di Thailand adalah *Thailand Creative Economy Agency* (TCEA) yang secara khusus dibentuk untuk menjadi pilar penyangga utama bagi proses koordinasi dan implementasi kebijakan di sektor ekonomi kreatif. Selain itu, industri kreatif juga didukung oleh *Thai Department of Intellectual Property* yang khusus menangani permasalahan terkait perlindungan HKI. Perkembangan industri kreatif di Thailand juga ditopang beberapa lembaga yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah, antara lain *Thailand Creative and Design Center* (TCDC) yang mengembangkan kampanye branding "*Creative Thailand*", *Bangkok Art and Cultural Center* (BACC), serta beberapa kegiatan dan festival seperti *Thailand International Creative Economy Forum* (TICEF).

Pemerintah Thailand dalam proses pengembangan potensi ekonomi kreatif berperan sebagai fasilitator utama. Peran pemerintah difokuskan pada perencanaan kebijakan strategis dan pengembangan kebijakan antar sektor yang terkait. Perkembangan

ekonomi kreatif di Thailand juga didukung oleh serangkaian kebijakan yang berbasis pada kebutuhan dan dinamika perkembangan yang ada, sehingga mampu mengidentifikasi persoalan utama dan kendala yang muncul di tengah masyarakat. Pendekatan utama yang dikembangkan adalah integrasi kebijakan di sektor pendidikan, investasi, dan kewirausahaan. Seluruh kebijakan dan program yang dikembangkan menjadi sarana konsolidasi potensi sekaligus upaya untuk mengenali berbagai persoalan dan tantangan yang terus berkembang secara dinamis.

Ada tiga negara di dunia yang berhasil menjadikan sektor industri kreatif sebagai salah satu kontributor utama terhadap PDB, yaitu Amerika Serikat (11,12% PDB), Thailand (9,5% PDB), dan Korea Selatan (8,67% PDB).<sup>6</sup> Di tahun 2008, Thailand telah mengekspor produk industri kreatif dengan nilai mencapai US\$ 13 milyar. Thailand menghasilkan lebih dari 1 triliun baht (sekitar 360 triliun rupiah) dan mempekerjakan 875 ribu tenaga kerja di sektor tersebut. Pada tahun 2008, satu orang pekerja kreatif Thailand menghasilkan lebih dari 411 juta rupiah per tahun, sementara di Indonesia pada tahun 2013, satu orang pekerja kreatif menghasilkan sekitar 54 juta rupiah per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand. Kinerja Sektor UKM Thailand juga merupakan salah satu yang terbaik di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.

---

<sup>6</sup> *Thailand's Creative Industries Contribute 10% of the Nation's GDP*. Diakses dari [http://www.academia.edu/3527256/Thailand\\_s\\_Creative\\_Industries\\_Contribute\\_10\\_of\\_the\\_Nation\\_s\\_GDP](http://www.academia.edu/3527256/Thailand_s_Creative_Industries_Contribute_10_of_the_Nation_s_GDP)

Ibu Hj. Siti Masrifah sedang menjawab pertanyaan dari anggota KADIN Thailand perihal produk kesehatan di Indonesia



Beberapa poin yang mengemuka dari telaah mengenai pengalaman Thailand adalah:

- 1.** Thailand telah mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk mempromosikan MEA. Ada sekitar 30 institusi yang terlibat dalam upaya tersebut. Indonesia dalam hal ini perlu mengkoordinasikan unsur-unsur yang terlibat dalam menyosialisasikan MEA dan merancang tupoksi yang jelas bagi institusi/divisi terkait.
- 2.** Thailand sudah memperkenalkan MEA pada anak-anak usia sekolah dasar, antarlain melalui film pendek ataupun iklan layanan sosial. Selain itu, dalam menyambut MEA, Thailand bukan hanya memperkenalkan konsep integrasi regional, tapi juga mendorong masyarakat untuk lebih mengenal budaya negara-negara ASEAN lainnya. Murid sekolah di Thailand juga dianjurkan untuk mempelajari bahasa salah satu negara ASEAN. Minat warga Thailand untuk mempelajari Bahasa Indonesia sangatlah besar, karena mereka mengincar pasar Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Indonesia, terutama berkaitan dengan pengenalan budaya dan bahasa.
- 3.** Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempromosikan MEA perlu diberdayakan. Sektor industri kreatif merupakan salah satu unggulan bagi Thailand. Thailand termasuk dalam 20 negara pengeksport produk kreatif terbesar, dan satu-satunya negara ASEAN yang termasuk didalamnya. Dukungan pemerintah Thailand terhadap industri kreatif diwujudkan dengan didirikannya Thailand Creative Design Center (TCDC) sebagai pusat informasi desain yang sangat komprehensif.



- 4.** Basis data dan informasi merupakan aset penting dalam menghadapi MEA. Masyarakat harus memiliki akses yang luas terhadap informasi, baik mengenai konsep MEA, kesempatan, dan tantangan yang akan dihadapi.
- 5.** Sesuai dengan fungsinya, DPR dapat menyusun, mengalokasikan dana, dan mengawasi jalannya proses sosialisasi MEA dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam resolusi AIPA, yaitu menekankan pentingnya semangat wirausaha dan pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan ujung tombak peningkatan daya saing nasional.



Atas:  
Situasi Pertemuan Delegasi BKSAP DPR RI dengan Masyarakat Indonesia di Ruang Pertemuan Kedutaan Besar RI untuk Bangkok

Bawah:  
Delegasi BKSAP DPR RI sedang mendapatkan pengarahan dari Pihak Manajemen TCDC





Atas:  
Delegasi BKSAP DPR RI sedang melakukan peninjauan ke  
AEC Information Center

Bawah:  
Foto Bersama Delegasi BKSAP DPR RI dengan Direktur  
Pusat Informasi AEC, Vitat Vajropala



## Belajar dari industri kreatif di Tiongkok

Industri kreatif adalah mesin penggerak ekonomi yang penting nilainya di Tiongkok. Industri ini mampu meningkatkan kapasitas inovasi dan dianggap sebagai modal pertumbuhan ekonomi masa depan. Tiongkok merupakan mitra penting ASEAN. Sejak 1996, Tiongkok menjadi mitra dialog permanen ASEAN; dan pada 2003, hubungan ASEAN-Tiongkok telah ditingkatkan menjadi kemitraan strategis. Hubungan ASEAN-Tiongkok telah menghasilkan banyak pencapaian nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua kawasan.

Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi negara berkembang terbesar dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu bertahan dari dampak pelemahan ekonomi global. BKSAP menyadari pentingnya DPR RI untuk mengamati strategi yang dijalankan Tiongkok dalam mengembangkan industri kreatifnya agar mampu bersaing di pasar global. Hasil yang didapatkan menjadi rekomendasi bagi Indonesia dalam meningkatkan kapasitas industri kreatifnya sekaligus menyambut implementasi MEA.

Beberapa pihak yang diidentifikasi sebagai pendorong utama industri kreatif di Tiongkok antara lain Kementerian Kebudayaan; Administrasi Negara untuk Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi (SAPPRFT); Wali Kota Beijing; Kamar Dagang dan Industri; serta Komisi Reformasi dan Pembangunan Parlemen Tiongkok.

Berdasarkan data Badan Statistik Tiongkok, sebagaimana dimuat dalam "Statistik Industri Budaya Tiongkok Tahun 2012," terdapat perkembangan yang luar biasa pada industri budaya negara ini. Dalam

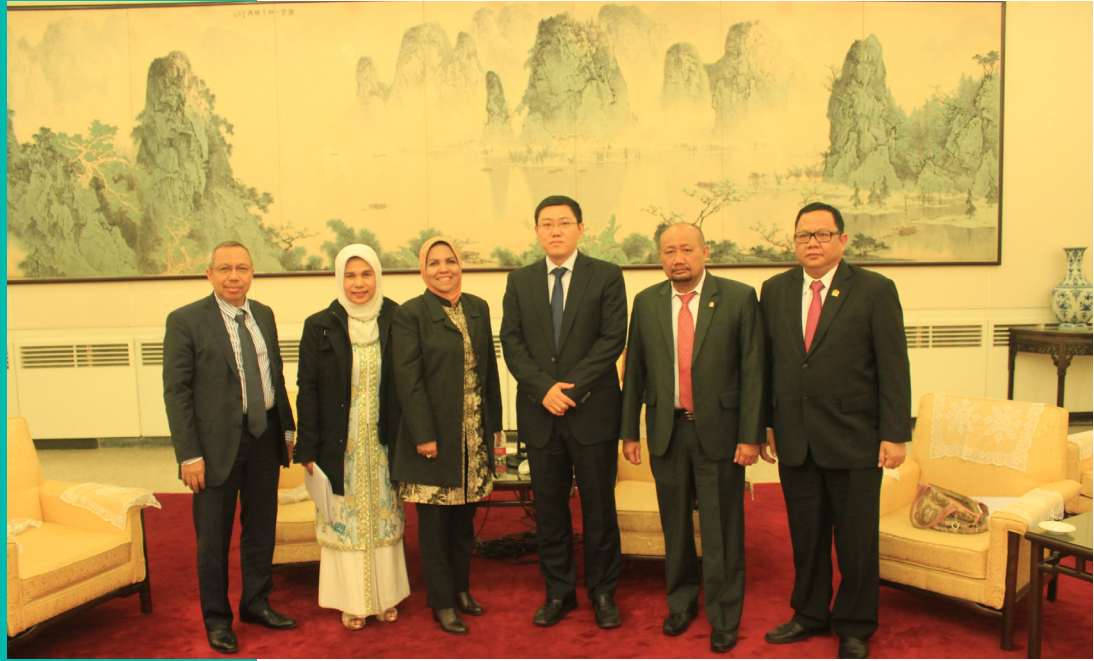
kurun waktu 2003 sampai 2013, produksi industri budaya Tiongkok tumbuh hingga 60 kali lipat, dari hanya 30 miliar Yuan pada 2003 menjadi 1.807 triliun Yuan, berkontribusi 3,84% terhadap PDB. Di Tiongkok, "industri budaya" merujuk pada konsep internasional yang dikenal sebagai "industri kreatif".

Pada tahun 2014, Media Journal Publishing China mengidentifikasi perkembangan tren industri budaya Tiongkok pada periode 2012-2013. Lembaga Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi (SAPPRFT) Tiongkok menyatakan bahwa pendapatan operasional penerbitan, percetakan dan pelayanan distribusi nasional telah mencapai 1.663 miliar Yuan pada tahun 2012, 14 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2011.

Industri film Tiongkok telah mencapai pendapatan *box office* lebih dari 21 miliar RMB pada tahun 2013. Ada 61 film Tiongkok dan film asing yang pendapatannya telah melampaui tingkat 100 Juta Yuan, hampir 3 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2012. Diantara film *blockbuster* tersebut, 34 adalah film Tiongkok dan 27 film impor. Industri kreatif Tiongkok juga berorientasi pada modernisasi, *high-end* dan pengembangan lintas media. Teknologi jaringan, 3D, *mobile* dan virtual telah menjadi bagian dari sektor industri kreatif.

Agar dapat menopang perekonomian nasional, industri kreatif membutuhkan dukungan sistem jasa keuangan yang memadai. Investasi industri budaya Tiongkok telah mencapai 500 miliar Yuan pada tahun 2012. Perkiraan volume investasi pada tahun 2016 adalah 1,2 triliun Yuan. Industri perbankan Tiongkok juga telah berupaya untuk memberikan pelayanan keuangan untuk industri kreatif. Industri

Kunjungan Delegasi  
CCPIT (the China Council  
for the Promotion of  
International Trade)



industri kreatif Tiongkok ditargetkan untuk menjadi industri bertaraf internasional yang lebih kompetitif.

Selain menikmati kemajuan ekonomi yang positif dari industri kreatif, Tiongkok juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain: lemahnya penegakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual; kurangnya SDM kreatif; kurangnya strategi pemasaran; dan ketidakpastian situasi ekonomi global<sup>7</sup>.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pengalaman RRT adalah:

- 1.** Terkait peran *National Peoples Congress* (NPC) untuk pengembangan industri kreatif, ada tiga langkah yang ditekankan yaitu menyediakan perangkat hukum, pengawasan khusus terhadap industri kreatif dan kepastian hukum guna menjamin pengembangan industri kreatif. Strategi memajukan industri kreatif juga dilaksanakan dengan perbaikan lingkungan, perbaikan birokrasi dan perbaikan hukum.
- 2.** Pemerintah Tiongkok menaruh perhatian besar terhadap penyusunan UU terkait pengembangan industri film. Tiongkok juga secara rutin mengirim sineas-sineas berbakatnya ke luar negeri untuk mendalami industri film.
- 3.** Tiongkok membatasi jumlah film impor, yaitu maksimal 25% dari total film yang sedang beredar dan maksimal 15% dari total waktu tayang film-film yang tengah diputar. SAPPFT juga menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas film domestik dapat mengurangi minat penonton terhadap film impor.
- 4.** Pemerintah Tiongkok telah menyusun sejumlah kebijakan untuk mengembangkan UMKM, antara lain melalui pelayanan izin usaha yang cepat (sekitar satu hari), perincian persyaratan pendirian kelompok usaha, dan pengurangan pajak sampai skala tertentu. Namun, perusahaan-perusahaan besar masih belum memberikan perhatian terhadap UMKM.
- 5.** *China Council for the Promotion of International Trade* (CCPIT) menempatkan Singapura sebagai rekan bisnis strategis di kawasan karena Singapura dinilai mampu menyediakan mekanisme pembiayaan yang lebih memadai. Kesiapan lembaga-lembaga perbankan di Indonesia dalam menghadapi MEA juga perlu ditelusuri dengan seksama.





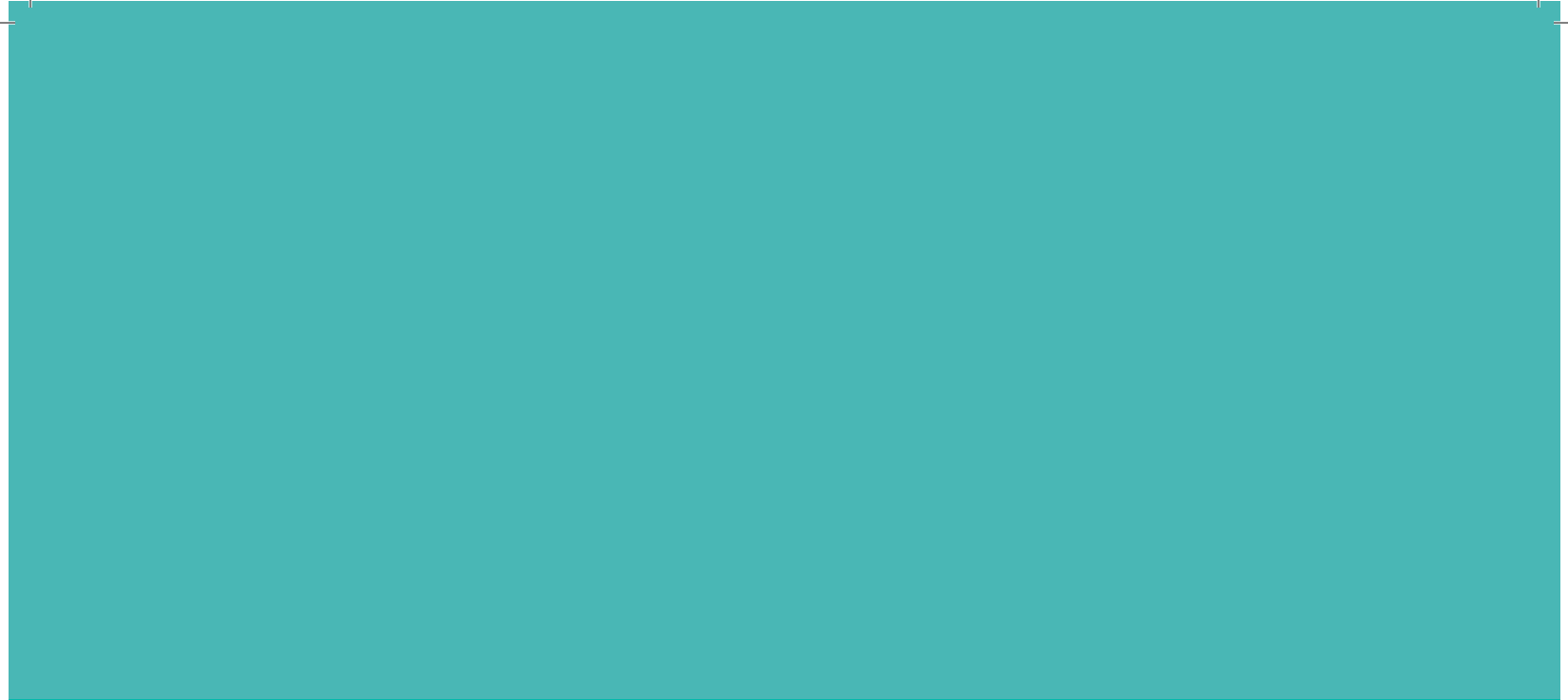
Ibu Dr. Nurhayati Ali Assegaf, ketua delegasi memberikan paparan kepada Wakil Direktur SAPPFT





Ketua Delegasi, Dr. Nurhayati Ali Assegaf sedang menerima paparan dari Manajemen Huawei di ICT Huawei







### III. REKOMENDASI

---

## A. Infrastruktur

---



Berdasarkan data *Logistic Performance Index* (LPI) yang dikeluarkan oleh *World Bank*, Indonesia menempati posisi ke-53 indeks infrastruktur dunia.<sup>8</sup> LPI merupakan salah satu cara untuk mengukur indeks daya saing kinerja logistik dan performa rantai *supply*.

Indeks tersebut mempertimbangkan indikator-indikator yang meliputi: (1) efisiensi kepastian dan pemeriksaan perbatasan, (2) kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, (3) kemudahan dalam melakukan pengangkutan dan pengiriman internasional, (4) kompetensi jasa logistik, dan (5) kesesuaian waktu (*timelines*) pengiriman dengan *schedule* yang ditetapkan.

Posisi Indonesia saat ini masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya yaitu Singapura di peringkat 5, Malaysia di peringkat 25, Thailand di peringkat 35, dan Vietnam di

---

<sup>8</sup> *Logistic Performance Index - Global Ranking 2014*. Diakses dari <http://lpi.worldbank.org/international/global>

peringkat 48. Sistem logistik Indonesia saat ini mengakibatkan biaya logistik yang cukup besar mencapai 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2014.

Apabila dikaitkan dengan industri kreatif, salah satu sub-sektor ekonomi kreatif yang tengah *booming* saat ini adalah industri digital. Dalam hal ini patut dipertimbangkan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, informasi, dan komunikasi yang mendukung industri kreatif berbasis digital.

Tidak dipungkiri industri kreatif seperti pembuatan dan pengembangan aplikasi komputer membutuhkan konektivitas internet dan akses data skala besar. Selain itu ketersediaan ruang/kreatif bersama (*creative co-working space*) yang dapat membantu *start-up* UMKM industri kreatif yang umumnya memiliki keterbatasan modal. Selain ketersediaan akses untuk ruang bekerja dan berusaha, akses untuk fasilitas pendukung lainnya layak untuk dipertimbangkan. Penjaminan ketersediaan akses terhadap fasilitas pendukung peningkatan pengetahuan dan teknologi baru seperti perpustakaan.

Selain infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, pengembangan industri kreatif juga terkendala infrastruktur gedung pertunjukan yang belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten.

Masih terjadinya disparitas pembangunan antara urban dan rural, maupun antara kawasan barat dan timur Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Pemerataan pembangunan yang menghindari pendekatan urban sentris menjadi hal mutlak. Dengan

adanya pemerataan pembangunan, peluang pemberdayaan kemajemukan lokal dapat dimaksimalkan sehingga dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ketersediaan jalan raya yang menghubungkan daerah-daerah termasuk daerah perbatasan guna menjamin kelancaran transportasi barang dan jasa antarwilayah, dan meningkatkan peluang ekspor ke negara tetangga.

Selain itu, akses transportasi tentu mendukung kelancaran lalu lintas bahan baku usaha, menurunkan biaya logistik, dan dapat menekan biaya produksi yang bermuara pada peningkatan keunggulan kompetitif industri kreatif di daerah. Pemerataan pembangunan berpengaruh positif pula bagi konektivitas infrastruktur, terutama konektivitas infrastruktur darat dan laut guna mendukung visi pengembangan wilayah berbasis kemaritiman.

## B. Sumber Daya



Salah satu kendala terbesar pengembangan industri kreatif Indonesia adalah belum optimalnya pengembangan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sementara industri kreatif merupakan industri yang dinamis dan menuntut inovasi berkelanjutan sehingga masalah SDM, kelangkaan bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik akan sangat menghambat pengembangannya.

Implementasi MEA dapat memunculkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya.

Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia. Untuk itu penting adanya penguatan regulasi investasi dalam rangka proteksi serta menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang ada untuk mencegah terjadinya *exploitation risks*.

Dari sisi sumber daya manusia, masalah yang dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM industri kreatif. Selain itu, untuk usaha kreatif turun temurun yang mengandalkan generasi berikutnya sebagai penerus usaha, seperti misalnya pada industri kerajinan perak di desa Celuk Tabanan Bali, regenerasi SDM yang masih lambat menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja terampil di sektor tertentu, pemberdayaan tenaga kerja UMKM industri kreatif dilakukan melalui pengembangan keterampilan yang mengasah kemampuan inovasi. Mengirimkan tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan secara berkala belum menjadi budaya bagi UMKM di Indonesia. Selain sosialisasi, diperlukan pula dukungan kesempatan pelatihan sebagai insentif baik bagi pemilik UMKM maupun bagi tenaga kerja untuk mengikuti workshop bagi peningkatan keterampilan mereka.

Dalam meningkatkan daya saing dan profesionalitas SDM dalam negeri, pendidikan menjadi kunci utama. Pendidikan yang mengarah pada pengembangan nilai-nilai kewirausahaan, pelestarian budaya, penguatan inovasi, keahlian manajerial modern, dan keahlian dasar bisnis.

Selain itu, diharapkan pula adanya regulasi ketenagakerjaan yang menjamin kesetaraan perlakuan antara SDM lokal dan asing terutama dalam hal penggajian yang setaraf untuk bidang dan level pekerjaan yang sama.

Meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pula pada penguasaan iptek untuk menopang kegiatan UKM dan ekonomi kreatif agar lebih kompetitif. Pemenuhan SDM yang berkualitas dan unggul, karena menguasai iptek, akan berpengaruh terhadap struktur industri di masa depan. Dan apabila sasaran di atas bisa dipenuhi, akan semakin kuat basis industri yang sedang dibangun dan dikembangkan di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong transformasi struktur ekonomi secara lebih cepat.

Di sisi lain, dalam menghadapi MEA, cara bekerja birokrasi harus berubah. Program Reformasi Birokrasi di Indonesia perlu terus ditingkatkan dengan cara pandang *competitive and representative government*, dalam rangka pembenahan paradigma aparatur birokrasi agar mampu bersiap dan bersaing menghadapi dan merespons transformasi ekonomi kawasan.

## C. Pembiayaan/Pendanaan



Permodalan dan akses sumber pembiayaan masih menjadi kendala bagi pengembangan UMKM. Minimnya akses pembiayaan pelaku industri kreatif, terutama disebabkan karena belum sesuai skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum *bankable*, *high risk high return*, *cash flow* yang fluktuatif, serta aset yang bersifat *intangible*.

Skema pembiayaan yang tersedia saat ini, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih dirasa mematok bunga yang tinggi dan memberatkan pelaku usaha. Selain itu, banyak *start-up* UMKM kreatif yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang pada akhirnya tidak *bankable* karena tidak memenuhi syarat pengajuan kredit perbankan seperti kelayakan usaha dan agunan, performa akun bank tiga bulan terakhir, serta lama waktu berbisnis.

Keterbatasan agunan dapat disiasati dengan mengajukan pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik LKM bank maupun

non-bank. Namun pembiayaan melalui LKM memberatkan pengusaha yang baru merintis usaha karena umumnya biaya atas pinjaman lebih tinggi dari tingkat bunga yang diterapkan lembaga perbankan.

Dalam hal ini DPR RI dapat berperan dalam membentuk perangkat kebijakan yang menjamin perluasan akses dan inklusi terhadap permodalan berbiaya rendah.

## D. Perangkat Hukum



Salah satu efek dari menguatnya peran pemerintah daerah menyusul transformasi Indonesia dari era sentralisasi menuju desentralisasi adalah keleluasaan pemerintah daerah (sub-nasional) untuk mengeluarkan regulasi dan aturan-aturan tersendiri.

Hal ini menimbulkan kerancuan perundang-undangan dan ketidakjelasan mengenai peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat terutama terkait pencatatan dan perizinan aktivitas usaha. Ketidakjelasan hanya akan menimbulkan keraguan investor dan memperburuk iklim investasi di Indonesia.

Selain itu terdapat permasalahan hukum di Indonesia, dimana belum semua perjanjian internasional ditingkat ASEAN dapat diterjemahkan ke dalam produk hukum nasional. Perangkat hukum yang ada pun belum mampu mengikuti dinamika situasi di Indonesia yang saat ini berbeda dengan masa Komunitas ASEAN pertama kali digagas.

Selain minimnya kebijakan yang terintegrasi, upaya pengembangan potensi industri kreatif juga terkendala persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Saat ini perlindungan terhadap daya kreasi dan kearifan lokal melalui regulasi yang menjamin kemudahan pendaftaran paten dan pendaftaran merek dagang belum optimal dilaksanakan.

Terkait hal tersebut, DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU tentang Merek dan RUU tentang Paten yang diharapkan dapat berperan dalam perlindungan terhadap merek produk lokal yang berpihak pada UMKM dan memiliki cakupan perlindungan yang jelas sesuai dengan kepentingan nasional.

Saat ini negara-negara anggota ASEAN belum memiliki sistem pendaftaran HKI baik paten maupun merek bersama sehingga pelaku UMKM harus mendaftar secara terpisah di setiap negara. Hal ini memberatkan pelaku UMKM baik dari sisi waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan birokrasi pendaftaran di kesepuluh negara ASEAN maupun biaya yang dikeluarkan.

Rencana Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Protokol Madrid sebagai upaya mempermudah proses pendaftaran merek di satu sisi bisa sangat menguntungkan UMKM yang akan memperluas pasar bagi produk dan jasa yang mereka hasilkan.

Penghematan biaya dan waktu tentu akan sangat membantu UMKM bersangkutan. Namun di sisi lain, rencana ratifikasi ini juga perlu dikaji ulang mengingat bahwa masih lebih banyak UMKM yang belum siap, infrastruktur pendaftaran *on-line* seperti data base merek, dan tenaga pemeriksa merek yang masih terbatas.

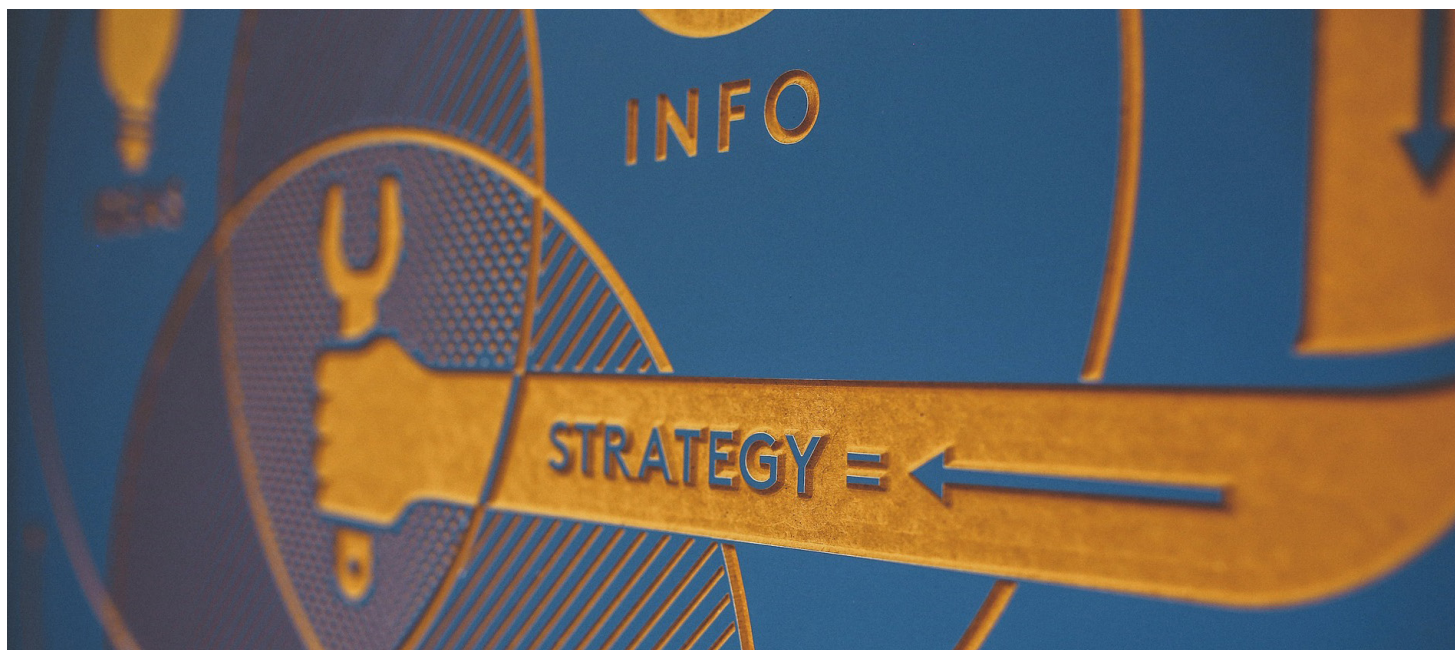
Sehingga ditakutkan bahwa dengan ratifikasi Protokol Madrid, merek-merek dari negara lain akan dengan mudah masuk ke Indonesia sementara merek lokal belum tentu bisa terdaftar di negara lain.

Sebagai tambahan, BKSAP menekankan perlunya menindaklanjuti Resolusi-Resolusi AIPA dan menerjemahkannya ke dalam legislasi nasional sebagai payung hukum yang sah, terutama Resolusi yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing nasional, termasuk diantaranya: *Resolusi AIPA RES.35GA/2014/ECO/02 tentang Meningkatkan Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan dalam Proses Menurunkan Kesenjangan Pembangunan di ASEAN*; *Resolusi AIPA RES.32GA/2011/ECO/01 tentang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan untuk Menurunkan Kesenjangan Pembangunan di ASEAN*; dan *Resolusi AIPA RES.30GA/2009/ECO/01 tentang Integrasi Ekonomi Regional*.

Salah satu bentuk tindak lanjut awal dari Resolusi-Resolusi AIPA adalah dengan mengkomunikasikan hasil-hasil sidang AIPA tersebut kepada alat-alat kelengkapan DPR RI terutama kepada Komisi-Komisi terkait.

## E. Strategi Pemasaran dan Perluasan Akses Pasar

---



Keberlangsungan suatu unit usaha sangat tergantung pada seberapa jauh usaha tersebut dapat mengembangkan pasar dan meningkatkan nilai penjualannya. Dengan demikian, daya saing juga menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.

Bukan hanya dari segi kualitas produk, tetapi juga bagaimana produk atau komoditas tersebut dikemas, dipromosikan, dan dipasarkan. Produk yang berkualitas belum tentu dapat dipasarkan apabila strategi pemasarannya kurang maksimal. Terutama bagi sektor UKM, *product moulding* masih banyak menjadi kendala.

Di tengah maraknya liberalisasi perdagangan, iklim kompetisi semakin meningkat, dan konsumen dihadapkan pada begitu banyak pilihan. Keberadaan standar menjadi sebuah kebutuhan bagi peningkatan daya saing sebuah produk dan jasa agar bisa diterima baik di pasar nasional maupun internasional.

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian yang diharapkan mampu menjadi payung hukum penerapan standar dan merupakan sebuah dukungan DPR RI untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

Namun UU 20 Tahun 2014 ini tidak akan bermanfaat secara maksimal tanpa sosialisasi yang intensif kepada masyarakat Indonesia. Sosialisasi dan edukasi tentang standar kepada masyarakat baik produsen yang melakukan ekspor, impor, dan masyarakat konsumen harus terus dilakukan. Masyarakat juga harus memiliki peran serta aktif dalam mengawasi produk impor yang masuk yang tidak memenuhi standar.

Hal ini karena UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk yang dipersyaratkan negara mitra dagang. Kesulitan tersebut akibat minimnya informasi yang diterima oleh UKM mengenai standar mutu dan keamanan di negara tujuan ekspor, proses sertifikasi standar produk ekspor menjadi beban biaya yang relatif besar bagi UKM, serta terbatasnya sumber daya yang terampil.

Nilai jual suatu produk bukan hanya dipengaruhi oleh kualitas produk itu sendiri, tetapi kemasan, desain, promosi, dan distribusi. Dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif, diperlukan kreatifitas. Disinilah industri kreatif dan sektor UKM dapat saling berkolaborasi. Sektor industri kreatif dapat mendorong pengembangan UKM melalui daya cipta dan kreasi yang lebih menarik bagi konsumen. Pelaku industri kreatif bukan hanya dapat menjalankan unit bisnisnya sendiri, tetapi juga dapat memberikan advokasi bagi para pelaku UKM untuk meningkatkan nilai jual produk mereka. Dalam hal ini, kerja sama antarsektor swasta perlu dipererat.

Selanjutnya mengenai perluasan akses pasar, untuk meningkatkan nilai jual produk, suatu unit usaha juga harus mengembangkan pangsa pasarnya. Pembentukan MEA dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku usaha domestik, apabila mereka jeli dalam melihat peluang yang ada. Untuk itu, mereka membutuhkan akses terhadap informasi yang lebih luas, termasuk mengenai pangsa pasar regional, budaya dan kebiasaan setempat, bahasa, dan aspek-aspek sosial-budaya lainnya.

Dalam menghadapi MEA, bukan saja mereka perlu mengetahui konsep dan mekanisme kerja sama regional, tetapi juga mempelajari dan memahami karakteristik negara lainnya demi menyusun strategi pemasaran yang efektif. Upaya untuk mendapatkan profit, strategi promosi dan inovasi pemasaran yang diimplementasikan oleh para pelaku UKM dan industri kreatif harus dapat melampaui *business-as-usual* atau strategi konvensional seperti yang masih diterapkan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem informasi dan advokasi bagi para pelaku usaha yang didukung oleh pihak eksekutif.

Untuk itu perlunya ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata,

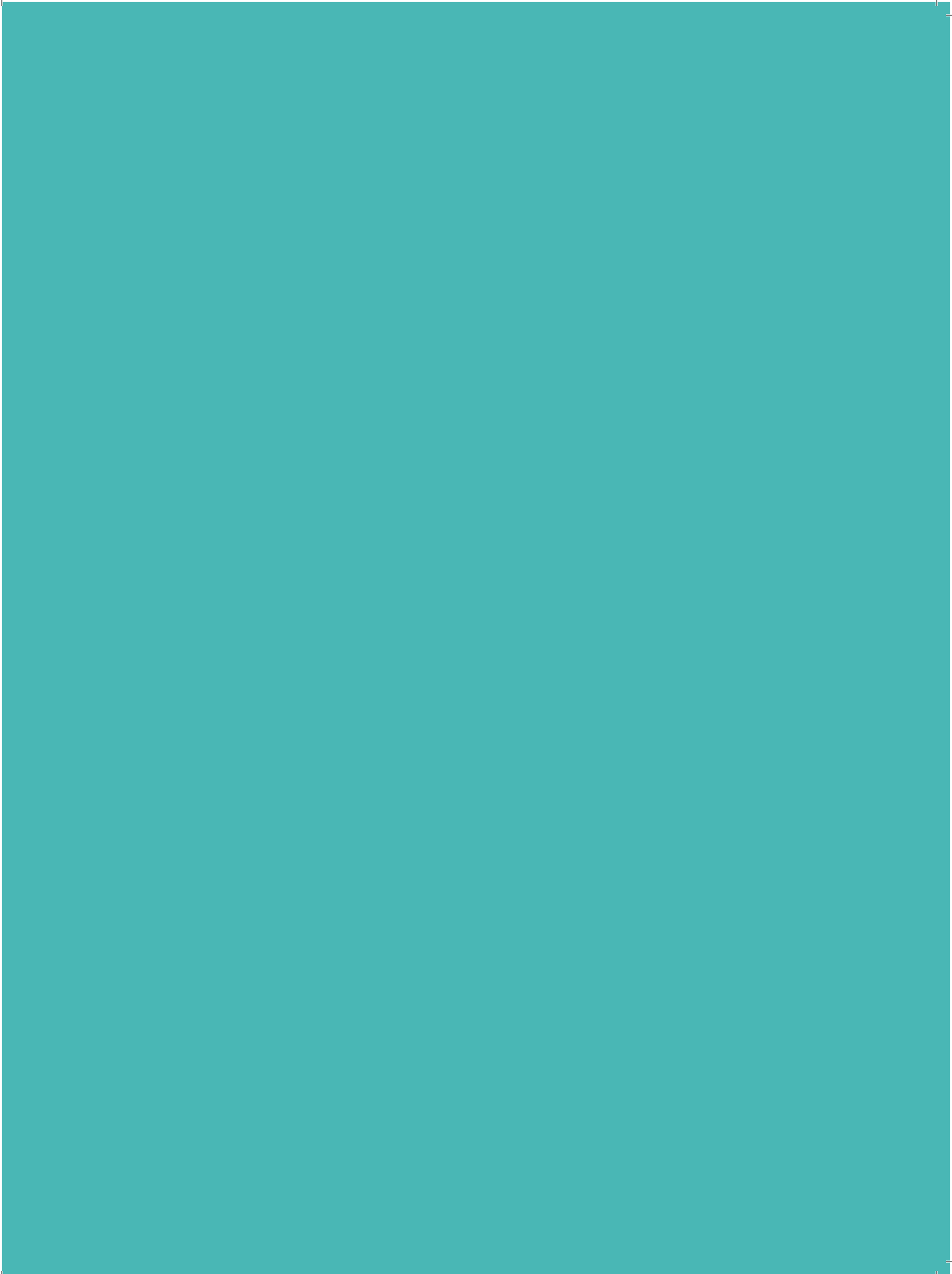
Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, BUMN, Dalam Negeri, Luar Negeri, Hukum dan HAM, Kominfo, Koperasi dan UKM serta Ketenagakerjaan guna mencapai arah dan tujuan industri kreatif tersebut.

Kementerian Luar Negeri misalnya, harus dapat menjalankan perannya dalam diplomasi ekonomi sekaligus menjadi sumber informasi bagi para pelaku usaha dalam negeri. Perwakilan RI di luar negeri dapat juga didorong untuk menjadi bagian solusi dari kasus-kasus penolakan produk ekspor Indonesia antara lain melakukan mediasi, konsultasi, dan menyediakan informasi terkait perkembangan standar dan selera pasar mitra dagang kepada para eksportir di Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan perannya, salah satunya dalam menyiapkan rencana dan program standardisasi, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dalam kegiatan perdagangan, penyiapan dan perumusan peraturan teknis dan wajib serta penyiapan rancangan notifikasi peraturan dalam standardisasi. Kementerian Peindustrian dan Kementerian Koperasi dan UMKM juga harus meningkatkan perannya dengan menjadi mentor dan menyediakan berbagai kemudahan kepada pelaku industri UKM. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai institusi mana saja yang terlibat dalam upaya ini, dan tupoksinya masing-masing agar tidak terjadi saling tumpang tindih. Perlu dipelajari pula, apakah diperlukan alokasi anggaran tertentu dalam upaya pengembangan sistem pemasaran dan perluasan pangsa pasar bagi sektor UKM dan industri kreatif.

## F. Ringkasan Rekomendasi

- Ketersediaan dukungan infrastruktur dan transportasi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal pengembangan industri kreatif, dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi, informasi, dan komunikasi yang mendukung pengembangan wirausaha kreatif berbasis digital.
- Proteksi sumber daya alam melalui penguatan regulasi investasi dalam rangka proteksi serta menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang ada untuk mencegah terjadinya *exploitation risks*.
- Optimalisasi pengembangan sumber daya terutama sumber daya manusia. Terkait sumber daya manusia, selayaknya dilakukan pengembangan keterampilan yang mengasah kemampuan inovasi.
- Dukungan bagi permodalan dan akses sumber pembiayaan melalui perangkat kebijakan yang menjamin perluasan akses dan inklusi terhadap permodalan berbiaya rendah.
- Menjamin ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan yang terintegrasi. Terkait Hak Kekayaan Intelektual, dapat dipertimbangkan mengenai kerja sama di kawasan untuk mengusahakan hak paten bersama guna memangkas birokrasi bagi pendaftaran merk dagang di masing-masing negara anggota ASEAN.
- Dukungan bagi pengembangan strategi dan akses pasar. Terutama melalui sistem informasi dan advokasi bagi para pelaku usaha yang didukung oleh pihak eksekutif. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri.
- Tindak lanjut resolusi-resolusi AIPA dan menerjemahkan kesepakatan sidang AIPA ke dalam legislasi nasional. Sebagai langkah awal dengan mengkomunikasikan hasil-hasil sidang AIPA tersebut kepada alat-alat kelengkapan DPR RI terutama kepada Komisi-Komisi terkait







## **IV. LAMPIRAN LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA**

---

BALI, INDONESIA  
16 - 17 SEPTEMBER 2015

BANGKOK, THAILAND  
17 - 20 NOVEMBER 2015

BEIJING, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK  
17 - 20 NOVEMBER 2015



**LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN  
PANITIA KERJA KERJASAMA ANTAR-PARLEMEN  
DALAM MENGHADAPI KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 2015**

**16 - 17 SEPTEMBER 2015, BALI, INDONESIA**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN LAPANGAN**

Kunjungan lapangan (Kunlap) Panitia Kerja (Panja) Kerjasama Antar-Parlemen dalam Menghadapi Komunitas Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) 2015 pada tanggal 16 – 17 September 2015 di Bali, didasarkan pada Surat Tugas Nomor: 56/D/ST-PD.LN/BKSAP-OPR/2015 tanggal 9 September 2015.

**B. SUSUNAN ANGGOTA PANJA**

Susunan Anggota Panja adalah sebagai berikut:

1. Yth. Sdr. Andika Pandu Puragabaya M.Si, M.Sc., Ketua Tim Kunlap/Wakil Ketua Panja
2. Yth. Sdri. Hj. Kartika Yudhisti B. Eng., M.Sc., Anggota BKSAP/Sekretaris Panja
3. Yth. Sdr. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si., Anggota Panja/Wakil Ketua BKSAP
4. Yth. Sdr. Drs. Yoseph Umar Hadi, M.Si., Anggota Panja/F-PDIP
5. Yth. Sdr. Mohamad Hekal, MBA, Anggota Panja/F-PGerindra
6. Yth. Sdr. Ir. Sumail Abdullah, Anggota Panja/F-PGerindra
7. Yth. Sdri. Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom, Anggota Panja/F-PG
8. Yth. Sdri. Betti Shadiq Pasadigoe, SE.AK, MM., Anggota Panja/F-PG
9. Yth. Sdr. H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos., Anggota Panja/F-PKS
10. Yth. Sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc, Anggota Panja/F-PKS

**C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN**

1. Menyerap aspirasi *stakeholders* di daerah terkait tantangan dan peluang yang dihadapi terkait implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);
2. Menggali tingkat kesadaran dan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakatnya terkait pemberlakuan MEA;
3. Menindaklanjuti resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA);

4. Diskusi terkait kebijakan / program pemerintah daerah dalam menghadapi pemberlakuan MEA;
5. Mendapatkan masukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai bahan perumusan kebijakan untuk skala nasional;
6. Menggali tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku industri (kreatif) terhadap pemberlakuan MEA.

#### D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

##### a. Persiapan Materi

Materi kunjungan lapangan dipersiapkan oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari departemen terkait. Selain itu, sebelumnya Sekretariat Organisasi Parlemen Regional BKSAP telah melakukan peninjauan, koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Bali.

##### b. Focus Group Discussion (FGD) dan Konsinyering

Sebelum melakukan kunjungan lapangan, Panja telah melakukan FGD dan konsinyering pada tanggal 2 April 2015 dan tanggal 11 Juni 2015 untuk pemantapan materi dan membahas program kerja Panja dengan mengundang narasumber dari instansi terkait dan pelaku industri kreatif.

## II. ISI LAPORAN

### A. URAIAN TENTANG KUNJUNGAN LAPANGAN

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 6 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2014 memperkuat komitmen Pemerintah RI dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Inpres tersebut diterjemahkan sebagai instruksi Presiden RI kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang akan dimulai pada akhir tahun 2015. Kunjungan lapangan Panja ke Provinsi Bali dimaksudkan untuk menilai kesiapan daerah dalam menyambut implementasi masyarakat ekonomi ASEAN terutama dalam kerangka ekonomi kreatif.

Provinsi Bali dipilih sebagai lokasi tujuan kunjungan lapangan karena merupakan provinsi unggulan industri kreatif. Dalam kunjungan lapangan ini, Panja melakukan agenda dialog yang dipimpin oleh Wakil Ketua Panja, Andika Pandu Puragabaya M.Si, M.Sc. Hadir dalam dialog tersebut Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta; Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, A.A. Ngurah Adi Ardana. ST; dan

jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dialog dilaksanakan di Ruang Rapat Cempaka, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali. Dalam dialog ini, anggota Panja menerima informasi dan data mengenai industri kreatif terutama jasa pariwisata di Bali, serta melakukan tanya jawab untuk menggali kesiapan daerah dalam mengelola persaingan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara menyusul pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Dari tanya jawab / dialog tersebut didapat keterangan adanya / banyaknya kendala-kendala yang dihadapi pelaku-pelaku usaha dan dari jajaran SKPD yang pada intinya mereka telah mengetahui pemberlakuan MEA namun merasa belum siap dalam menghadapi MEA 2015.

Selain itu, Panja juga melakukan kunjungan ke *Bali Creative Industry Centre* (BCIC). Pembentukan BCIC berdasarkan Keputusan Menteri Industri Kecil dan Menengah (IKM) Nomor: 146/M-IND/Kep/3/2014 tentang Pemberdayaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar menjadikan Bali menjadi pusat promosi dan pengembangan industri kreatif nasional. BCIC mengumpulkan lulusan sekolah menengah vokasi terkait subsektor ekonomi kreatif yang telah diidentifikasi pemerintah yaitu arsitektur, periklanan, pasar barang seni, kerajinan, desain, mode, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, dan kuliner. Putra-putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia ini kemudian dididik menjadi tenaga terampil siap kerja. Selain itu BCIC bertindak pula menghubungkan tenaga kerja dengan industri yang membutuhkan.

Secara umum BCIC mempunyai lima peran utama, yaitu sebagai Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Promosi dan Pemasaran, Pusat Pengembangan Industri Software dan Konten, serta Pusat Inkubasi Bisnis. BCIC diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang kerap dihadapi pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah, seperti keterbatasan bahan baku, minimnya riset dan teknologi, kesulitan promosi dan pemasaran, hingga risiko pencurian desain. Kegiatan yang dilakukan antara lain *branding*, pelatihan dan *creativepreneurship* lingkup nasional, inkubator bisnis kreatif, kompetisi desain, klinik desain dan pembuatan purwarupa, serta workshop pengembangan produk dan gelar karya.

Selanjutnya, Panja melakukan kunjungan ke Industri tenun tradisional dan di Wilayah Blahbatu dan industri kerajinan perak di Celuk. Dalam kunjungan ini, anggota Panja disambut dan didampingi oleh Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata, SH. Anggota Panja melakukan diskusi mengenai tantangan-tantangan dan kendala yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) industri kreatif di Bali saat ini dan kesiapan dalam menghadapi MEA 2015. Tantangan yang dihadapi saat ini antara lain terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tarif pajak, bea operasional terkait bea listrik dan serbuan produk-produk impor seperti benang murah dari Tiongkok.

## B. AGENDA KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan lapangan panja terdiri dari sejumlah agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bali, DPRD Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar beserta jajaran satuan kerja perangkat daerah Bali, dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
2. Kunjungan ke BCIC sebagai pusat industri kreatif nasional;
3. Kunjungan ke pusat kerajinan unggulan Kabupaten.

## C. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

1. Mengenai kesadaran dan kesiapan Pemprov Bali dan masyarakatnya terkait pemberlakuan MEA, Panja mendapati bahwa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten telah memiliki *awareness* yang tinggi akan implementasi MEA akhir tahun ini. Saat ini Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar telah meraih predikat kompeten dalam bidang pariwisata dari Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BNSP). Pemprov Bali juga telah meningkatkan dukungan infrastruktur untuk percepatan pembangunan antara lain dengan penyediaan sarana prasarana pariwisata, pembangunan Bandara Bali Utara dan akses tol yang menghubungkan Bali Utara dengan Selatan dan Bali Barat dengan Timur (Bali Mandara). Hal ini dilakukan untuk menjembatani ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Bali;
2. Dalam diskusi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi pemberlakuan MEA, baik pemerintah maupun DPRD Provinsi Bali beranggapan bahwa selayaknya ada Undang-Undang atau peraturan daerah yang mewajibkan tenaga kerja asing untuk memahami budaya setempat demi menjaga kearifan lokal menurut Anggota Panja, Bali terkenal di dunia karena kekuatan budayanya, namun, saat ini Bali menghadapi tantangan pelestarian budaya dikarenakan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali lebih tertarik pada wisata artifisial. Berdasarkan hasil *survey* dari Bank Indonesia, 56 persen wisatawan mancanegara datang ke Bali untuk menikmati wisata buatan;
3. Mendapatkan masukan pemerintah daerah dan DPRD untuk DPR sebagai bahan perumusan kebijakan untuk skala nasional. Dalam hal ini, Pemda dan DPRD mengangkat salah satu masalah yang dihadapi mengenai keberpihakan dana perimbangan terkait konsep pola perundangan saat ini yang menekankan pada penerimaan dari sumber daya alam sedangkan Bali lebih banyak memiliki potensi penerimaan dari jasa pariwisata. Selain usulan legislasi yang melindungi kearifan lokal dan tenaga kerja lokal, diusulkan pula anggaran sertifikasi terutama sertifikasi pariwisata;
4. Terkait dengan upaya panja menggali tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku industri (kreatif) terhadap pemberlakuan MEA, dalam diskusi baik dengan jajaran KADIN Bali maupun pelaku industri tenun dan kerajinan perak di Kabupaten Gianyar didapati bahwa kebanyakan industri kreatif di Bali merasa kurang siap menghadapi MEA. Mereka berharap dalam mengimplementasikan MEA nantinya, pemerintah Indonesia dapat menjamin manfaat yang optimal bagi industri dalam negeri dan lebih

berpihak pada UMKM. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kualitas SDM UMKM, terbatasnya skema pembiayaan berbunga rendah, dan regulasi yang belum memiliki kesamaan persepsi sehingga membingungkan pelaku usaha. Dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA, KADIN Bali telah melakukan beberapa upaya parsial antara lain standardisasi produk barang dan jasa serta standardisasi keahlian SDM;

5. Kelebihan Panja BKSAP adalah terdiri dari lintas fraksi dan lintas komisi di DPR RI. Terkait mandat BKSAP untuk melakukan diplomasi parlemen termasuk diplomasi ekonomi, para pelaku usaha di Bali berharap BKSAP dapat mengkomunikasikan kepentingan pelaku usaha kreatif Indonesia baik di DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) / Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan instansi-instansi / kementerian terkait maupun di kawasan ASEAN melalui organisasi regional AIPA.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Kunjungan lapangan Panja mendapati bahwa antusiasme implementasi MEA di level elit Pemerintah RI serta kementerian-kementerian terkait tidak dibarengi dengan antusiasme yang sama di tataran pelaku usaha. Pelaku usaha merasakan belum siap menghadapi MEA dan menyimpan kekhawatiran mendalam akan daya saing yang kurang dalam menghadapi 'serbuan' produk-produk bebas bea masuk dari negara-negara anggota ASEAN.

Dalam hal ini baik Pemprov Bali maupun pelaku usaha mengharapkan Panja Kerja Sama Antar-Parlemen Dalam Menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dapat memberikan saran legislasi dan anggaran yang dapat lebih mendukung kesiapan daerah terutama terkait pengembangan SDM, standardisasi, permodalan dan promosi.

Selain itu, unsur DPRD tingkat I dan tingkat II, KADIN dan pelaku usaha di Bali menyampaikan harapan kepada Panja untuk secara intensif menjembatani kepentingan daerah di level nasional melalui rapat-rapat di DPR RI dengan Pemerintah Pusat dan di level regional melalui peran diplomasi yang dimiliki BKSAP.

#### B. SARAN

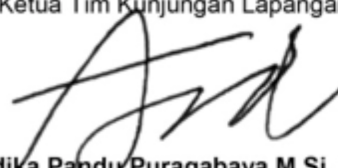
1. Hasil kunjungan lapangan Panja sekiranya dapat dikomunikasikan ke Komisi-komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan tindak lanjut yang sesuai;
2. Hasil kunjungan Panja ini dapat menjadi basis bagi kunjungan lapangan Panja selanjutnya;
3. Agar lebih banyak waktu yang disediakan dalam kunjungan Panja guna mendapat informasi yang lebih detail, struktur kendala-kendala yang dihadapi supaya dapat memperoleh solusi yang jitu terhadap permasalahan yang ada.

#### IV. PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kunjungan Lapangan Panja berlangsung pada tanggal 16 – 17 September 2015 di Provinsi Bali. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama Panja Kerjasama Antar-Parlemen Dalam Menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 September 2015

Ketua Tim Kunjungan Lapangan,



**Andika Pandu Puragabaya M.Si, M.Sc**  
Anggota DPR RI/F-PGerindra



**L A P O R A N**  
**KUNJUNGAN DELEGASI BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**UNTUK MENINDAKLANJUTI RESOLUSI-RESOLUSI**  
**ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)**  
**DALAM RANGKA IMPLEMENTASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**DI BANGKOK – THAILAND, 17 NOVEMBER 2015 – 20 NOVEMBER 2015**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pengiriman Delegasi**

Partisipasi Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindaklanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dalam rangka Implementasi *ASEAN Economic Community* pada tanggal 17 November 2015 – 20 November 2015 di Bangkok – Thailand didasarkan atas surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 141/PIMP/I/2015-2016 tanggal 11 November 2015.

### **B. Susunan Delegasi**

Susunan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindaklanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dalam rangka Implementasi *ASEAN Economic Community* yaitu :

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Sdr. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc | Fraksi P-Gerindra (A-363) |
| 2. Sdr. H. Indro Hananto                           | Fraksi PG (A-305)         |
| 3. Sdri. Hj. Melani Leimena Suharli                | Fraksi PD (A-413)         |
| 4. Sdr. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si         | Fraksi PKB (A-72)         |
| 5. Sdri. Dra. Hj. Masrifah, M.A                    | Fraksi PKB (A-77)         |

### **C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi**

1. Mempelajari sistem produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dimiliki Thailand, sehingga negara tersebut memiliki daya saing di pasar ASEAN.
2. Memiliki gambaran mengenai perkembangan industri kreatif beserta lembaga yang menangani industri kreatif di Thailand.
3. Untuk memberikan bahan masukan kepada AKD terkait dan pemerintah mengenai upaya peningkatan daya saing UMKM dan sektor ekonomi kreatif Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.
4. Sebagai sarana memperdalam khasanah pengetahuan para anggota BKSAP DPR RI dalam rangka penyusunan rekomendasi MEA.

### **D. Misi Delegasi**

Kunjungan Delegasi BKSAP ke Thailand dilakukan dalam upaya mempererat kerja sama antar Parlemen serta mendorong peningkatan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat serta menemukan solusi bagi permasalahan yang dihadapi kedua negara terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif.

### **E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan**

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadapi Kunjungan BKSAP ini. Sebelum pelaksanaan, Delegasi BKSAP DPR RI telah mengadakan rapat Deegaasi dan konsinering guna mendapatkan masukan-masukan dari instansi terkait, kunjungan ke daerah dalam rangka mencari masukan dari pelaku sektor ekonomi kreatif dalam menghadapi MEA, dan koordinasi persiapan acara kunjungan dan materi Delegasi dengan KBRI Bangkok.

## II. ISI LAPORAN

### A. Informasi Singkat mengenai Thailand



Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, (namun pernah diduduki oleh tentara Jepang sebagai Teritori Imperial, Oleh karena mendapat pengaruh dan tekanan bangsa Barat yang mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 maka diberikan banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania di Thailand.

Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama *Siam*, negara ini mengganti nama internasionalnya menjadi "Thailand" pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Kerajaan Thai menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.

Kalender Kerajaan Thai didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Kerajaan Thai.

Pada 26 Desember 2004, pesisir barat Kerajaan Thai diterjang tsunami setinggi 10 meter setelah terjadinya gempa bumi Samudra Hindia 2004, menewaskan 5.000 orang di Kerajaan Thai, dan setengahnya merupakan wisatawan.

Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Kerajaan Thai Selatan yang mempunyai populasi dengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini untuk empat tahun berikutnya.

### **Ekonomi**

Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 - rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Kerajaan Thai, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia.

Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005.

Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).

### **Politik**

Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.

Parlemen Kerajaan Thai yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau *Rathasapha*, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (*Sapha Phuthaen Ratsadon*) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (*Wuthisapha*) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (*Sandika*), yang jaksanya dilantik oleh raja. Kerajaan Thai juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.

### ***Bangkok Shutdown***

Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dituntut oleh masyarakat Thailand untuk mundur dari jabatannya. Demonstrasi besar-besaran ini dipicu kontroversi RUU Amnesti Politik yang didukung pemerintah. Para demonstran menilai dukungan pemerintah atas RUU tersebut merupakan upaya untuk memberi peluang Thaksin kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman atas kasus korupsi. Untuk menghentikan demonstrasi, PM Yingluck berencana mengadakan Pemilu di bulan Februari. Usul tersebut ditolak oposisi yang menghendaki pembentukan dewan rakyat untuk menjalankan pemerintahan sebelum pemilu, serta melaksanakan reformasi yang memerangi korupsi. Krisis politik yang berlangsung telah sejak tahun 2013 tersebut memukul perekonomian Thailand dan menelan korban jiwa. Hal ini memicu kekhawatiran terkait stabilitas politik dan keamanan di Thailand dan di Asia Tenggara pada umumnya.



*Kerusuhan Bangkok Shutdown*

Demonstrasi anti-pemerintah secara besar-besaran telah berlangsung di Bangkok sejak tanggal 13 Januari 2014. Kelompok anti pemerintah (oposisi) serta Komite Reformasi Demokrasi Rakyat atau People's Democratic Reform Committee (PDRC) menuntut PM Yingluck mundur dan melakukan reformasi sebelum pemilu. Demonstrasi ini melumpuhkan Bangkok (*Bangkok Shutdown*). Kelompok

oposisi bersikukuh reformasi sistem pemilu harus dilakukan sebelum pemilu yang independen siap digelar setidaknya-tidaknya satu tahun lagi. Mereka menginginkan terbentuknya "dewan rakyat" yang ditunjuk untuk mengawasi reformasi sebelum pemilu mendatang. Dekrit keadaan darurat diberlakukan untuk meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa pemilu dini 2 Februari yang ditentang oleh para demonstran dapat berjalan tanpa gangguan. Sampai pada tanggal 22 Januari 2014, demonstrasi anti-pemerintah terus berlanjut di ibukota Bangkok sementara demonstrasi dengan kekerasan telah meluas di wilayah Thailand utara.

People's Democratic Reform Committee (PDRC) mengancam akan melumpuhkan Bangkok (*Bangkok Shutdown*) dengan tidak mengenal batas waktu. Hal tersebut dilakukan dengan menutup jalan utama ke kompleks pemerintahan serta pusat perekonomian. Demi alasan keamanan para pegawai pemerintah diliburkan, namun pusat-pusat bisnis masih tetap beroperasi secara normal. Pelumpuhan tersebut baru akan dihentikan setelah PDRC memenangkan pertarungan. Pergerakan PDRC itu menuai gerakan massa pro-pemerintah di bagian utara Thailand, yang pada pemilu sebelumnya dikuasai partai Pheu Thai yang pro pemerintah. Sejauh ini para pemimpin partai masih percaya bahwa militer tidak akan melancarkan kudeta.

Perdana Menteri Yingluck telah menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia menyatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menjaga demokrasi dan mempunyai tugas konstitusional untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri. PM Yingluck berkeras bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan krisis politik yang semakin dalam di Thailand adalah lewat pemilihan umum. PM Yingluck telah memberikan usulan untuk menunda pemilu menjadi 4 Mei 2014 serta mengusulkan pembentukan dewan reformasi nasional sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan krisis politik yang sudah berlangsung beberapa bulan. Jika rakyat tidak lagi menginginkan pemerintahan ini, maka mereka harus datang dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Sebagian besar lawan politik Yingluck tidak menginginkan digelarnya pemilu. Mereka khawatir lewat pemilu justru keluarga Shinawatra atau sekutunya yang akan berkuasa kembali di Thailand. Kelompok oposisi menolak semua tawaran politik yang diajukan pemerintah berkuasa. Pertikaian politik yang sedang terjadi sepertinya tidak memiliki jalan tengah. Sehingga Yingluck harus mencari alternatif solusi bagi kalangan rakyatnya. Akhirnya pada tahun 2013, Pemerintahan dan Parlemen Thailand dibubarkan secara resmi dan dikendalikan secara sementara oleh pihak militer hingga penyelenggaraan pemilu berlangsung.

## **B. Hubungan Bilateral Kerjasama Indonesia-Thailand**

Hubungan Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Melalui pertukaran peradaban, masyarakat kedua bangsa telah terhubung melalui seni budaya, agama, arsitektur, dan karya sastra. Hubungan diplomatik Indonesia-Thailand berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Kerja sama antara kedua negara berlangsung di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, iptek, dan budaya. Hubungan ini diperluas lagi dengan adanya saling kunjung antara pemimpin kedua negara.

Hubungan bilateral RI dengan Thailand selama ini telah berlangsung dengan baik berkat pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin kedua negara. Kedekatan hubungan ini dapat dilihat dari saling kunjung pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara yaitu kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Thailand, Desember 2005; kunjungan PM Thaksin ke Indonesia untuk menghadiri KTT Asia Afrika, April 2005; kunjungan PM Surayud Chulanont, 21 Oktober 2006; kunjungan PM Samak Sundaravej, 26-27 Maret 2008; Menlu Kasit Piromya, 11 Februari 2009; kunjungan kenegaraan PM Abhisit Vejjajiva ke Indonesia, 20-21 Februari 2009; pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, General Songkiti Jagabatara, dengan Presiden RI di sela-sela penyelenggaraan World Ocean Conference di Manado, 14 Mei 2009; dan pertemuan Menlu Kasit Piromya dengan Sekjen Deplu di sela-sela ASEAN-GCC Ministerial Meeting di Manama, Bahrain, 29 Juni 2009.

Payung utama kegiatan kerjasama bilateral antara kedua negara adalah forum Komisi Bersama yang dibentuk setelah ditandatanganinya Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik RI-Thailand di tahun 1992. Dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama RI-Thailand yang berlangsung pada 16-18 Januari 2008 di Petchaburi, Thailand telah dibahas beberapa permasalahan bilateral yang akan terus dikembangkan oleh kedua negara antara lain meliputi masalah: ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan dan kebudayaan, investasi, perikanan, pariwisata, energi, kerjasama teknik, dan kerjasama IMT-GT. Pada pertemuan Komisi Bersama RI-Thailand sebelumnya (ke-5) di Yogyakarta pada 2003, disepakati mengubah nama The Joint Commission on Economic and Technical Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand menjadi The Joint Commission between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand.

Sekalipun antara Indonesia-Thailand belum ada persetujuan kebudayaan yang mengatur hubungan sosial budaya, namun keinginan untuk meningkatkan hubungan dengan Thailand di bidang ini cukup besar. Bidang-bidang yang sering digarap dalam kerjasama ini antara lain bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kemahasiswaan, kesenian, olahraga, keagamaan, kesehatan, lingkungan sosial, pertukaran kunjungan/undangan tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat negara, swasta dan kepramukaan.

Di bidang Hankam, kedua negara tidak terikat oleh suatu persetujuan, namun demikian hubungan dan kerjasama di bidang tersebut berlangsung dengan baik. Hal ini tercermin dari seringnya saling tukar kunjungan antara pimpinan Angkatan Bersenjata antara kedua negara, dan pertukaran siswa dalam rangka pendidikan Sekolah Staf Komando.

### C. Program Kegiatan

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) memiliki tugas untuk melaksanakan diplomasi parlemen. Hal ini tertuang dalam Pasal 116 UU Ayat (1) UU No. 42/2014 Perubahan atas UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), yang menerangkan bahwa tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Di tataran regional, BKSAP secara aktif melakukan kiprah diplomasi parlemen melalui *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*. Sidang Umum AIPA beberapa tahun terakhir ini telah mencapai kesepakatan regional untuk mempersempit kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN. Termasuk di dalamnya upaya kerja sama penyiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi baru ASEAN.

Resolusi-resolusi AIPA terkait hal tersebut adalah AIPA Resolution RES.35GA/2014/ECO/02 on **Promoting the Development of Entrepreneurship Skills in the Process of Narrowing Development Gaps in ASEAN**, AIPA Resolution RES.32GA/2011/ECO/01 on **Promoting Economic Growth and Sustainable Development towards Narrowing Development Gap in ASEAN**, dan AIPA Resolution RES.30GA/2009/ECO/01 on **Regional Economic Integration**.

Sejalan dengan hal tersebut, pada masa persidangan ke II tahun 2015, BKSAP melakukan kunjungan lapangan ke salah satu negara di kawasan yang dianggap unggul baik dari segi UMKM maupun ekonomi kreatif. Hal ini untuk menindaklanjuti mandat resolusi-resolusi AIPA dan telaah kesiapan negara tersebut dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Perkembangan ekonomi kreatif di Thailand telah lama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional periode 2012 – 2016. Thailand termasuk ke dalam 20 negara di dunia yang mengekspor produk dari sektor ekonomi kreatif. Penggerak utama bagi perkembangan industri kreatif di Thailand adalah *Thailand Creative Economy Agency (TCEA)* yang secara khusus dibentuk untuk menjadi pilar penyangga utama bagi proses koordinasi dan implementasi kebijakan di sektor ekonomi kreatif. Selain itu, industri kreatif juga didukung oleh *Thai Department of Intellectual Property* yang khusus menangani permasalahan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perkembangan industri kreatif di Thailand juga ditopang beberapa lembaga yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah, antara lain *Thailand Creative and Design Center (TCDC)* yang mengembangkan kampanye branding “*Creative Thailand*”, *Bangkok Art and Cultural Center (BACC)*, serta beberapa kegiatan dan festival seperti *Thailand International Creative Economy Forum (TICEF)*.

Pemerintah Thailand dalam proses pengembangan potensi ekonomi kreatif berperan sebagai fasilitator utama. Peran pemerintah difokuskan pada perencanaan kebijakan strategis dan pengembangan kebijakan antar sektor yang terkait. Perkembangan ekonomi kreatif di Thailand juga didukung oleh serangkaian kebijakan yang berbasis pada kebutuhan dan dinamika perkembangan yang ada, sehingga mampu mengidentifikasi persoalan utama dan kendala yang muncul di tengah masyarakat. Pendekatan utama yang dikembangkan adalah integrasi kebijakan di sektor pendidikan, investasi, dan kewirausahaan. Seluruh kebijakan dan program yang dikembangkan menjadi sarana konsolidasi potensi sekaligus upaya untuk mengenali berbagai persoalan dan tantangan yang terus berkembang secara dinamis.

Adapun agenda kunjungan Delegasi BKSAP selama berada di Thailand adalah sebagai berikut :

### 1. Kunjungan ke *Thailand Creative Design Center*



*Resepsionis TCDC*

Pada 18 November 2015, Delegasi BKSAP DPR RI mengunjungi *Thailand Creative Design Center (TCDC)* di the Emporium Shopping Complex, Bangkok, Thailand sebagai salah satu upaya untuk mempelajari kesiapan negara tetangga dalam menyambut pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui kunjungan ini adalah penyusunan rekomendasi pengembangan sektor industri kreatif untuk meningkatkan daya saing nasional.

TCDC didirikan sebagai salah satu sarana edukasi yang menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung sektor industri kreatif, yaitu: ruangan pameran, ruangan seminar, perpustakaan, pusat riset, dan pusat data material desain. Pengunjung dapat melakukan riset desain dari berbagai aspek, yaitu Material, Tekstil, Peralatan, Teknologi Digital, dan Pengembangan Keahlian. Ribuan literatur dan inspirasi untuk keperluan riset dapat diperoleh dari perpustakaan desain. Untuk mengakses perpustakaan, biaya keanggotaan yang diberlakukan adalah 640 Baht atau sekitar 250 ribu rupiah per tahun untuk mahasiswa, dan 1200 Baht atau sekitar 500 ribu rupiah per tahun untuk para profesional.



Foto Perpustakaan TCDC (kiri) dan Foto Delegasi BKSAP DPR RI

TCDC Bangkok juga telah mendirikan *Material ConneXion'*, yaitu tempat yang menyediakan sekitar 7.500 koleksi bahan/material desain. *Material ConneXion'* Bangkok merupakan pusat basis data material satu-satunya yang berada di Asia Tenggara. Basis data tersebut juga dapat diperoleh secara *online* dengan biaya 250 USD per tahun. Saat ini, ada kurang lebih 7.000 anggota yang terdaftar sebagai pengguna, termasuk perusahaan ternama seperti BMW dan *Estee Lauder*.

Selain menyediakan fasilitas riset, TCDC juga kerap memperkenalkan konsep keberlanjutan pada penggunaan material desain, salah satu contohnya adalah bahan *leather* yang terbuat dari daun palem, dan berasal dari Indonesia. Bahan lainnya yang dapat digunakan atau dibentuk menjadi material *leather* adalah jamur. Keduanya memiliki tekstur yang sangat mirip dengan material kulit sapi/kambing.



Delegasi BKSAP DPR RI sedang mendapatkan pengarahan dari Pihak Manajemen TCDC

## 2. Pertemuan dengan *Thailand National Legislative Assembly*



*Gedung Lama National Legislative Assembly*

Wakil Ketua Parlemen Thailand memberikan sambutan dan menyampaikan salam hangat kepada ketua DPR dan ketua DPD RI. Parlemen Thailand akan mendirikan divisi khusus ASEAN dalam rangka menyambut pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, Parlemen juga melakukan penyusunan regulasi yang disesuaikan dengan kerangka kerja sama MEA. Regulasi yang disusun Parlemen dapat diakses oleh khalayak umum melalui *website*. *Website* tersebut juga merupakan sarana pertukaran informasi perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi DPR RI. Parlemen Thailand juga mendorong adanya kerja sama pertukaran informasi dan penguatan kapasitas untuk staff parlemen melalui kerja sama teknis.

Bagi Indonesia, Thailand merupakan partner strategis dan berperan penting dalam pembentukan MEA. Kedua negara sejak 1950 sudah berkomitmen untuk mempererat kerja sama dalam berbagai bidang. Melalui kunjungan ini, DPR berharap dapat lebih memperkuat hubungan kedua negara. Pembentukan MEA akan mendatangkan tantangan sekaligus kesempatan baru bagi situasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki komitmen untuk menyukseskan MEA, antara lain melalui pengadopsian cetak biru MEA ke dalam legislasi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global, sektor industri kreatif memberikan kesempatan baru terutama bagi jutaan unit usaha UKM dalam menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan. Thailand memiliki kinerja yang cukup baik dalam pengembangan industri kreatif. Begitu pula dengan sektor UKM Thailand yang memiliki kinerja terbaik ketiga di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.



*Delegasi BKSAP DPR RI sedang melakukan Courtesy Call dengan Wakil Ketua Parlemen dan Anggota Grup Kerjasama Thailand – Indonesia*

Bidang UKM menurut Wakil Ketua Parlemen merupakan salah satu sektor penting yang terus didukung oleh Pemerintah dan Parlemen Thailand. Sektor UKM di Thailand dikembangkan melalui sistem OTOP (*One Tambon One Product*) di mana setiap distrik atau provinsi memiliki produk unggulan masing-masing yang dikembangkan secara profesional. Dalam SIUM AIPA di Malaysia, telah diadopsi sejumlah resolusi, termasuk mengenai UKM. Resolusi tersebut langsung didiskusikan kembali di lingkungan Parlemen Thailand dan dikomunikasikan kepada Lembaga/Kementerian terkait.

Persoalan ekonomi dunia tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat dan tidak dapat ditangani sendiri. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kerja sama dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing regional. Parlemen Thailand mengharapkan agar kedua negara dapat terus meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi, termasuk dalam sektor perikanan. Thailand memiliki keahlian dan keunggulan dalam proses penangkapan ikan serta memiliki fasilitas perkapalan yang memadai. Sementara itu, Indonesia memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pasar yang luas. Thailand dan Indonesia juga dapat memanfaatkan besarnya pangsa pasar Muslim di dunia. Saat ini, kerja sama perikanan antara kedua negara mengalami kendala yang disebabkan oleh sektor swasta yang bekerja secara masing-masing. Namun saat ini, Thailand sudah melakukan revisi UU, sehingga ada jaminan bahwa penangkapan ikan tidak dilakukan secara ilegal dan penyelundupan manusia dapat ditekan. Thailand mengharapkan agar kerja sama perikanan dengan Indonesia dapat ditingkatkan kembali. Thailand dalam hal ini menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

### 3. Pertemuan dengan KADIN Thailand

Thailand melihat pasar produk halal sebagai sektor industri yang potensial untuk dikembangkan, bahkan sudah mendirikan *Halal Center* di salah satu universitas. Sertifikasi halal juga sudah diberlakukan. Thailand mendorong adanya kerja sama dengan Indonesia terutama di industri produk halal.

Pada 2015, kita akan segera membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kebebasan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja diharapkan dapat berjalan dengan diiringi oleh kemudahan bisnis (*ease of doing business*). Dalam kerangka kerja sama regional, Thailand akan semakin kompetitif.

KADIN Thailand secara rutin mengadakan diskusi/*brainstorming session* dengan pihak eksekutif mengenai pertumbuhan ekonomi dan industri. KADIN Thailand juga mewakili sektor swasta dalam berbagai proses negosiasi perdagangan bebas. KADIN Thailand telah mendirikan universitas yang saat ini sudah memiliki 21 ribu mahasiswa. Perwakilan KADIN Thailand, **Parfun Julapun**, menyampaikan adanya kesulitan dalam usaha retail, karena 80 persen produk harus berasal dari Indonesia. Sulit untuk memenuhi peraturan itu. Pajak impor beberapa bulan lalu meningkat, sehingga harga produk retail juga harus meningkat.



*Logo Thailand Chamber of Commerce*

Delegasi BKSAP yang diwakili **Hj. Melani Leimena Suharli** menyatakan bahwa bukan hanya investor asing, tetapi praktisi UKM domestik juga mengeluhkan soal pajak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah saat ini sedang menyusun regulasi mengenai upaya pengembangan UKM, terutama bagaimana UKM dapat menghadapi kendala perpajakan.

Bagi pengusaha Thailand, permasalahan iklan juga menjadi kendala. Pemasangan iklan dikenakan pajak. Keluhan tersebut juga disampaikan oleh pelaku usaha di Indonesia. Hal yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana Thailand dan Indonesia dapat bekerjasama untuk mengatasi hal tersebut. Impor kosmetik juga harus melalui BPOM dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar satu tahun untuk mendapatkan sertifikat. Persoalan yang sama juga dialami oleh brand lokal seperti Mustika Ratu, beberapa produk lokal masih sulit dipasarkan di luar negeri.

Mengenai produk impor dari Thailand, ada peraturan mengenai inspeksi dari Indonesia untuk setiap pengiriman. Di Thailand juga ada peraturan serupa, tetapi hanya untuk pengiriman pertama. Hj. Melani Leimena Suharli menyampaikan bahwa peraturan tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran apabila produk yang diimpor dari Thailand tersebut berasal dari Indonesia, hanya diberikan label Thailand. Hal itulah yang kami hindari. Terutama dalam menyambut MEA, segala sesuatunya harus lebih transparan. Informasi dari KADIN Thailand akan menjadi PR bagi DPR.



*Ibu Hj. Siti Masrifah sedang menjawab pertanyaan dari Anggota KADIN Thailand perihal produk kesehatan di Indonesia*

Sebagaimana disampaikan **Dra. Hj. Siti Masrifah, MA**, pada prinsipnya bagi Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan, segala jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tidak dapat dipasarkan di Indonesia. Apabila ada keluhan dari negara asing mengenai perizinan yang memakan waktu lama, Komisi IX akan menyampaikan hal tersebut kepada BPOM. Karena bukan hanya produk luar yang mengalami kendala, tetapi produk lokal juga menghadapi isu serupa. Apabila ada UU yang menyebabkan kesulitan impor, maka akan menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. UU Perdagangan juga belum lama disahkan sehingga masih ada kemungkinan untuk diamandemen.

Apakah ada insentif yang diberikan kepada sektor UKM? Konsep OTOP Thailand sebenarnya diadopsi dari pengelolaan UKM di Indonesia. KADIN Thailand mendorong adanya kerja sama yang lebih erat dalam perdagangan produk-produk UKM. Dalam bidang industri kreatif, Thailand memiliki target untuk menjadi *tourism hub* dan pusat industri hiburan seperti perfilman. KADIN Thailand menekankan pentingnya *ease of doing business*.

Sebagai bentuk dukungan bagi sektor UKM, Wakil Ketua KADIN Thailand, **Phairush Burapachaisri** menyatakan bahwa tidak ada iuran yang dikenakan pada pelaku UKM untuk bergabung dengan KADIN. Pengusaha besar membantu UKM. Saat ini ada sekitar 82 ribu unit UKM yang terdaftar di KADIN Thailand.



Foto Penyerahan Cenderamata dari Wakil Ketua KADIN Thailand kepada Ketua Delegasi BKSAP DPR RI

Pengembangan industri kreatif di Thailand sudah berkembang di luar negeri sejak 10 tahun yang lalu. Departemen Perdagangan membantu pengusaha lokal untuk memasarkan produknya di luar negeri. Setiap bulan Mei, Thailand mengadakan *food fair*, yang 80 persen diantaranya merupakan produk halal. *Thai Food Fair* berikutnya akan diselenggarakan pada 25-29 Mei 2016. Ada sekitar 4.000 peserta dalam pameran tersebut dan sebagian diantaranya berasal dari Indonesia. Thailand bukan hanya mendukung pengembangan produk makanan dalam negeri, tetapi dari seluruh negara.

**Taks Sriratanobhas**, asisten Ketua KADIN Thailand, mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih membutuhkan impor gula dari Thailand, tetapi pengusaha Thailand mengalami kesulitan untuk ekspor produk gula ke Indonesia. Hambatan-hambatan seperti ini harus dihapus dalam rangka MEA.

DPR akan segera menyusun regulasi mengenai ekspor impor produk gula. Hj. Melani Leimena Suharli mendorong adanya kerja sama antara kedua negara dalam bidang digital, terutama pembuatan animasi. Akan lebih baik apabila Badan Ekonomi Kreatif Indonesia dapat bekerjasama dengan lembaga kreatif di Thailand.

Wakil Ketua KADIN Thailand mengatakan bahwa sejak pemerintahan Jokowi, ada banyak perubahan yang terjadi, terutama dari segi peraturan. KADIN Thailand mendukung adanya perubahan-perubahan untuk menuju lebih baik. Dalam kerangka kerja sama ekonomi regional, masalah yang dihadapi Indonesia adalah masalah bagi Thailand. Kita harus saling membantu. Bagaimanapun, Indonesia adalah saudara tua bagi Thailand.

**Pirinee Prinsulaka** mempertanyakan mengenai Hak Guna Bangunan yang juga menjadi isu tersendiri bagi pengusaha Thailand. Apakah HGB benar-benar dapat diperpanjang? Hj. Melani Leimena Suharli menyampaikan bahwa HGB memang berlaku selama 30 tahun, tetapi pemerintahan di Indonesia berganti setiap 5 tahun, mungkin saja ada peraturan yang berubah. Tetapi tentu saja ada jaminan bahwa HGB berlaku selama 30 tahun pertama.

Dalam pembahasan mengenai *Trans Pacific Partnership* (TPP), baik Thailand maupun Indonesia sangat sering berdiskusi. Keduanya belum menjadi anggota TPP. Ketua Delegasi, **Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.**, menyampaikan bahwa Indonesia sampai saat ini masih mengkaji lebih mendalam kemungkinan tersebut.

**Dr. Sombat Thiratrakoolchai** menyampaikan pendapatnya mengenai TPP, yaitu bahwa Indonesia harus berhati-hati apabila akan bergabung dengan TPP karena bagi industri tertentu seperti makanan hewan, produk makanan hewan dari Amerika akan menjadi lebih murah dan mengancam keberlangsungan perusahaan Thailand di Indonesia. Biaya produksi jagung di Amerika sangatlah murah, hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan mereka.

#### 4. Pertemuan dengan Departemen Negosiasi Perdagangan

Pada 19 November 2015, Delegasi BKSAP DPRRI mengadakan pertemuan dengan **Thipasuk**, Direktur Pusat Informasi AEC dari Departemen Negosiasi Perdagangan Kerajaan Thailand, dan **Vitat Vajropala**, Direktur Biro Peningkatan Kapasitas Perdagangan. *AEC Information Center* didirikan pada 2011 sebagai salah satu upaya untuk menjembatani para pelaku usaha domestik dengan pangsa pasar regional. *AEC Information Center* juga menyediakan informasi seputar perkembangan MEA di 76 provinsi. Sektor UKM harus memahami mekanisme perdagangan yang diimplementasikan melalui MEA. Apabila mereka tidak memahami hal ini, maka mereka tidak akan bisa mengekspor produk ke luar negeri dan akhirnya tidak akan mampu berkompetisi. Pusat Informasi serupa juga sudah dimiliki oleh Kementerian Perdagangan RI.

Di Thailand, *AEC Information Center* juga didirikan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap sektor UKM. Awalnya, para pelaku usaha mengeluh karena informasi yang disediakan oleh *AEC Information Center* dinilai terlalu akademis. Oleh karena itu, *AEC Information Center* mulai menyediakan informasi yang lebih dibutuhkan oleh para pelaku usaha, termasuk mengenai prosedur ekspor-impor ke negara-negara ASEAN. *AEC Information Center* melayani sekitar 40 ribu UKM dan menyediakan layanan informasi selama 24 jam. Sektor UKM dapat memperoleh informasi mengenai perjanjian perdagangan bebas, kesempatan dan tantangan bagi UKM, seminar dan pelatihan, serta informasi terkini mengenai situasi perekonomian. Ada sekitar 1,5 juta warga Thailand yang mencari informasi MEA ke pusat informasi AEC.

Departemen Negosiasi Perdagangan juga kerap mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas dan mempromosikan dunia wirausaha pada generasi muda, bukan hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi para pelajar agar mereka dapat lebih memahami MEA. Konsep integrasi regional harus diperkenalkan sejak dini pada anak-anak usia sekolah karena nantinya, merekalah yang akan menentukan kesuksesan MEA. Anak-anak usia sekolah di Thailand tidak hanya diberikan pengetahuan/pelatihan mengenai MEA, tetapi juga didorong untuk mempelajari/memahami kebudayaan negara-negara ASEAN lainnya.



*Delegasi BKSAP DPR RI sedang melakukan peninjauan ke AEC Information Center*

Departemen Negosiasi Thailand menggunakan teknologi terbaru untuk mendistribusikan informasi, termasuk membuat aplikasi *smartphone* dan tablet, mempublikasikan buku dan jurnal, serta meluncurkan sistem perpustakaan online untuk mempermudah akses warga terhadap informasi. Pada 2015, Biro Peningkatan Kapasitas Perdagangan memperoleh kucuran dana untuk mempromosikan AEC sebesar 43 juta Baht atau sekitar 17,2 Milyar Rupiah. Ada lebih dari tiga puluh lembaga di Thailand yang berkaitan dengan AEC. Vitat Vajropala memperkirakan, dana yang dikucurkan pemerintah Thailand untuk mempromosikan AEC mencapai sekitar 20 Milyar Baht atau sekitar 8 Trilyun Rupiah.



Foto Bersama Delegasi BKSAP DPR RI dengan Direktur Pusat Informasi AEC, Vitat Vajropala

**Hj. Melani Leimena Suharli** menanyakan bagaimana pemerintah Thailand dapat melindungi produk-produk UKM-nya dalam kerangka OTOP. Menurut Vitat Vajropala, konsep OTOP diadopsi dari Jepang. Tantangan yang dihadapi adalah biasanya, produsen UKM ingin memproduksi beragam jenis produk, tetapi mereka tidak bisa memasarkannya. Hanya sedikit diantara mereka yang berhasil menjual produknya di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah Thailand menyelenggarakan pameran setiap tahunnya khusus untuk mempromosikan produk UKM. Sektor UKM juga harus diberikan pemahaman bahwa mereka sebaiknya memproduksi ragam produk yang memang diminati oleh konsumen. Produk yang diproduksi juga harus terus mengikuti tren atau perkembangan terkini, baik dari segi model, material/bahan, warna, dan aspek desain lainnya. Sektor UKM harus memiliki cara pandang yang berbeda dengan sektor usaha besar, karena produk yang diproduksi biasanya tidak dalam jumlah besar/skala industri.

#### 5. Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia

Delegasi BKSAP DPR RI mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di KBRI Thailand, dengan tujuan untuk menerima masukan dari masyarakat Indonesia mengenai langkah-langkah atau kebijakan yang harus diambil untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat regional dan bagaimana persiapan Thailand dalam menyambut MEA.

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain melalui kebijakan *tobacco control*. Efek rokok sangatlah destruktif bagi generasi muda. Thailand meredam peredaran iklan rokok sehingga peningkatan jumlah perokok sangat kecil dibandingkan Indonesia. Dari aspek pendidikan, Thailand sangat gencar meluncurkan program-program internasional di perguruan tinggi domestik sehingga banyak menarik minat warga asing. Thailand pandai mengemas sesuatu, misalnya dengan meluncurkan program *medical tourism* yang kebanyakan pengunjungnya berasal dari Timur Tengah.



*Situasi Pertemuan Delegasi BKSAP DPR RI dengan Masyarakat Indonesia di Ruang Pertemuan Kedutaan Besar RI untuk Bangkok*

Dalam kesempatan tersebut masyarakat Indonesia mengajukan sejumlah pertanyaan, antara lain mengenai konsep MEA dan apa perbedaan antara Indonesia dan Thailand dalam menghadapi MEA? Pertanyaan lainnya berhubungan dengan aspek keamanan regional. MEA akan menjadikan kawasan ASEAN tanpa batas, sehingga resiko kejahatan lintas batas negara seperti penyelundupan manusia dan narkoba, juga akan semakin meningkat. Langkah-langkah apa yang sudah ditempuh oleh DPR dalam mengawasi aparat keamanan di perbatasan? Pertanyaan lainnya tentang bagaimana sikap anggota DPR dalam menghadapi situasi yang tengah terjadi saat ini, terutama sehubungan dengan bidang energi dan sumber daya mineral?

**Dra. Hj. Siti Masrifah, MA** menyatakan bahwa masukan mengenai *tobacco control* akan menjadi pekerjaan rumah bagi DPR. Pendidikan dan kesehatan memang patut menjadi perhatian utama. Saat ini, DPR masih menyusun RUU Pertembakauan yang bertujuan untuk melindungi para petani tembakau. Sehubungan dengan bidang pendidikan, sesungguhnya Indonesia juga tidak ketinggalan, karena 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Komisi IX banyak menerima keluhan dari BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan di Indonesia, terutama di pelosok, seharusnya layak digunakan. SDM kesehatan di Indonesia juga harus ditingkatkan kapasitasnya. MEA akan menjadikan ASEAN sebagai satu pasar tunggal dan basis produksi. Liberalisasi perdagangan dalam MEA adalah perdagangan yang memiliki aturan. Indonesia saat ini sudah berada pada tahap darurat narkoba. Seluruh jajaran masyarakat harus terlibat secara langsung dalam memberantas narkoba. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyelundupan narkoba. Halaman Indonesia bukan DKI Jakarta, tapi daerah perbatasan. Apabila kondisi daerah perbatasan belum memadai, maka Indonesia juga sebenarnya belum bisa tampil/ menampakkan muka.

**Hj. Melani Leimena Suharli** berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya belum siap menghadapi MEA, terutama apabila dibandingkan dengan Thailand yang sudah memperkenalkan MEA pada anak-anak usia sekolah dasar. Namun demikian, Indonesia harus optimis. Oleh karena itu kita harus menonjolkan industri kreatif, misalnya dengan desain yang artistik dan orisinal, juga dengan mengadakan pameran/eksibisi di luar negeri. Selain itu, kita juga harus membenahi kapasitas SDM. Mengenai kesehatan, di Indonesia sudah banyak rumah sakit bertaraf internasional, namun kondisi ini tidak merata. Aspek kesejahteraan harus diperhatikan secara merata di seluruh Indonesia. Mengenai rokok, pasal mengenai kretek sebagai warisan budaya sudah dibatalkan, namun memang ada pihak-pihak tertentu yang terus berupaya untuk menyelundupkan pasal-pasal yang mendukung industri rokok.

**H. Indro Hananto** menginformasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi di Komisi VII. Dinamika yang tengah terjadi merupakan salah satu wujud demokrasi. Berlatar belakang pelaku usaha, beliau memiliki sejumlah cita-cita. Sebanyak 70 persen APBN berasal dari pajak. Oleh karena itu, pajak perlu kita awasi bersama. Setiap warga negara sudah memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan negara, oleh karena itu negara wajib memberikan *public service*. Dari sudut pandang energi, Bapak Indro Hananto mengapresiasi upaya pemerintah dalam mencari sumber energi alternatif. Saat ini, subsidi BBM dapat diketahui secara transparan. Investor asing tentu saja mengharapkan agar nilai investasinya terus berkembang dan juga sangat memperhatikan aspek keamanan. Apabila Indonesia ingin tumbuh, kita perlu memberikan kenyamanan kepada para investor. Dalam desentralisasi, para pelaku usaha dipusingkan dengan perbedaan peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah.

Dalam hal sumber daya manusia, MEA menjadi tantangan tersendiri bagi para perawat, karena MEA mengkondisikan kebebasan tenaga kerja ahli. Di Thailand, pemerintahnya menyarankan mahasiswa agar mempelajari salah satu bahasa dari negara ASEAN. Minat mahasiswa Thailand terhadap bahasa Indonesia sangat tinggi. Di dalam negeri, belum ada sosialisasi yang memadai mengenai MEA, khususnya terhadap para perawat. UU Keperawatan di Indonesia sudah disahkan, namun Thailand sudah jauh lebih maju dalam memperhatikan kesejahteraan dan kualitas/kapasitas tenaga perawat. Perawat di Thailand memiliki pandangan sendiri, terpisah dari pandangan dokter. Dalam kerangka kerja sama MEA, diperkirakan bahwa ASEAN akan terpolarisasi, yaitu dimana setiap negara ASEAN akan memiliki keunggulan masing-masing. Lalu apa keunggulan Indonesia? Pelajaran apa yang bisa diambil dari Thailand yang bisa diaplikasikan di Indonesia?



*Bpk. H. Indro Hananto sedang memberikan penjelasan dari salah seorang warga Indonesia perihal Energi Terbarukan*

**Ketua Delegasi Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc** berpendapat bahwa Indonesia dalam menghadapi MEA bagaikan sesosok janin yang belum siap untuk dilahirkan. Kita harus menggodok kembali, apakah MEA merupakan suatu pencapaian bagi Indonesia, atau malah *suicide*? Apabila Indonesia memutuskan untuk mundur dari MEA, maka citra Indonesia di mata internasional akan lebih buruk.

Rencana atau langkah apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi dampak negatif dari MEA? **Dra. Hj. Siti Masrifah, MA** menyampaikan bahwa ada wacana untuk menghapus peraturan mengenai kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, padahal aturan tersebut bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal. Dari kunjungan ke TCDC dan Kementerian Perdagangan Thailand, ada beberapa hal yang dapat dijadikan contoh, antara lain mengenai utilitas teknologi informasi dalam mempromosikan MEA dan mendistribusikan informasi kepada khalayak umum. Komisi IX DPR RI saat ini tengah menyusun RUU Kefarmasian. Adapun mengenai status perawat yang setara dengan Dokter di Thailand, akan menjadi pe-er bagi Indonesia.

Banyak pandangan pesimis di dalam negeri terhadap MEA, padahal pandangan serupa juga dimiliki oleh negara ASEAN lainnya. Nantinya dalam kerangka MEA, akan ada mekanisme transisi bagi delapan jenis profesi yang diatur melalui *ASEAN Mutual Recognition Arrangement*, jadi tidak ada *cut-off* bagi para tenaga profesional dalam pembentukan MEA. Kunci utama dalam menghadapi MEA adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan formal dan informal. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, diperlukan *logistic cost* yang rendah. Dan terakhir, sudah saatnya kita menghilangkan ego sektoral. Sebanyak 54 persen tenaga kerja Thailand adalah tamatan SD dan SMP, namun mereka memiliki angka pengangguran yang sangat rendah. *Playing field* bagi Indonesia dalam MEA akan jauh lebih luas. Tidak ada cara lain kecuali mempersiapkan diri.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Delegasi BKSAP DPR RI telah menjalankan tugas sesuai dengan misi dari kunjungan ini dan telah mendapatkan sejumlah informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kesiapan negara Thailand, khususnya dari sektor industri kreatif dan UKM, dalam menyambut pembentukan MEA.
2. Pemerintah Thailand telah mengalokasikan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk mempromosikan MEA. Ada sekitar 30 institusi yang terlibat dalam upaya tersebut. Indonesia dalam hal ini perlu mengkoordinasikan unsur-unsur yang terlibat dalam menyosialisasikan MEA dan merancang tupoksi yang jelas bagi institusi/divisi terkait.
3. Thailand sudah memperkenalkan MEA pada anak-anak usia sekolah dasar, antara lain melalui film pendek ataupun iklan layanan sosial. Selain itu, dalam menyambut MEA, Thailand bukan hanya memperkenalkan konsep integrasi regional, tapi juga mendorong masyarakat untuk lebih mengenal budaya negara-negara ASEAN lainnya. Murid sekolah di Thailand juga dianjurkan untuk mempelajari bahasa salah satu negara ASEAN. Minat warga Thailand untuk mempelajari Bahasa Indonesia sangatlah besar, karena mereka mengincar pasar Indonesia.
4. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempromosikan MEA perlu diberdayakan.
5. Sektor industri kreatif merupakan salah satu unggulan bagi Thailand. Thailand termasuk dalam 20 negara pengeksport produk kreatif terbesar, dan satu-satunya negara ASEAN yang termasuk didalamnya. Dukungan pemerintah Thailand terhadap industri kreatif diwujudkan dengan didirikannya Thailand Creative Design Center (TCDC) sebagai pusat informasi desain yang sangat komprehensif.
6. Basis data dan informasi merupakan aset penting dalam menyambut terbentuknya MEA. Masyarakat harus memiliki akses yang luas terhadap informasi, baik mengenai konsep MEA, kesempatan, dan tantangan yang akan dihadapi.

#### B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai MEA ke seluruh lapisan masyarakat, sejak kanak-kanak hingga usia dewasa. Sosialisasi ini perlu dilaksanakan di setiap lini kehidupan masyarakat.
2. Untuk mendukung pengembangan industri kreatif, hal pertama yang perlu diasah adalah pengetahuan masyarakat terhadap kreatifitas dan sumber daya yang dimiliki. TCDC dapat menjadi model sentra informasi industri kreatif yang komprehensif, yang dapat memperkaya imajinasi para wirausahawan, memberikan inspirasi, dan meningkatkan kapasitas SDM di bidang industri kreatif.
3. DPR dapat berupaya untuk mendorong minat masyarakat terhadap budaya negara-negara ASEAN sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan rasa saling memiliki antar masyarakat ASEAN.
4. Sesuai dengan fungsinya, DPR dapat menyusun, mengalokasikan dana, dan mengawasi jalannya proses sosialisasi MEA dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam resolusi AIPA, yaitu menekankan pentingnya semangat wirausaha dan pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan ujung tombak peningkatan daya saing nasional.

5. DPR juga diharapkan untuk segera mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada institusi terkait.

#### IV. PENUTUP

Demikian pokok-pokok Laporan Delegasi Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindaklanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dalam rangka Implementasi *ASEAN Economic Community* pada tanggal 17 November 2015 – 20 November 2015 di Bangkok – Thailand . Diharapkan dari kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja BKSAP. Atas nama Delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 November 2015

a.n. Delegasi

KETUA DELEGASI,



ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi, M.Si, M.Sc

A-363





## L A P O R A N

**KUNJUNGAN DELEGASI BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK MENINDAKLANJUTI RESOLUSI-RESOLUSI  
*ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)*  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
DI BEIJING - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, 17 – 20 NOVEMBER 2015**

---

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen merupakan Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) yang bertugas menjalankan diplomasi parlemen, sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang menerangkan bahwa tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Dalam konteks multilateral, BKSAP senantiasa berupaya berkontribusi ikut menyukseskan program-program global, di antaranya isu perdagangan bebas regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan di awal 2016. Terkait MEA, BKSAP telah membentuk Panitia Kerja (Panja) MEA yang dasar pembentukannya karena sebuah kebutuhan jalinan komunikasi, kerjasama dan berbagi pengalaman dengan negara-negara ASEAN dan mitra strategisnya, guna menggali sejauhmana kesiapan Indonesia menghadapi MEA sebagai wujud dari implementasi ASEAN *Free Trade Agreement* (AFTA). Panja juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR dan khususnya bagi Pemerintah dalam meningkatkan daya saing barang produksi nasional dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia di era perdagangan bebas regional ASEAN.

Salah satu program kerja Panja MEA BKSAP adalah melakukan kunjungan (*study visit*) ke parlemen negara-negara anggota *ASEAN Inter Parliamentary Assembly* (AIPA) dan negara mitra wicara AIPA serta-serta institusi-institusi yang relevan dalam kerangka penyuksesan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 khususnya untuk kepentingan Indonesia. Dalam kaitan ini, Panja MEA telah menyelenggarakan *study visit* ke Tiongkok sebagai salah satu mitra wicara strategis AIPA sekaligus negara yang dinilai berhasil mengembangkan industri kreatif dengan UMKM sebagai tulang punggungnya.

#### **B. Dasar Pengiriman Delegasi**

Partisipasi Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindaklanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dalam rangka Implementasi *ASEAN Economic Community* pada tanggal 17 November 2015 – 20 November 2015 di Beijing - Republik Rakyat Tiongkok didasarkan atas surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 141/PIMP/I/2015-2016 tanggal 11 November 2015.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Panja MEA BKSAP ke Tiongkok adalah:

1. Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antar-parlemen dalam kerangka penguatan dan peningkatan kerja sama terkait implementasi MEA di kawasan ASEAN.
2. Untuk bertukar pandangan (*sharing best practices*) dengan parlemen Tiongkok terkait tugas-tugas keparlemenan (legislasi, anggaran, dan pengawasan) terutama dalam kaitan dukungan parlemen atas industri kreatif dan pengembangan UMKM.
3. Untuk mempererat tali persahabatan serta saling mendorong upaya peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara (antarparlemen, antarpemerintah, antarbisnis, dan antarmasyarakat) di bidang ekonomi dalam rangka memahami peluang dan tantangan penerapan MEA terhadap ekonomi Indonesia, terutama tingkat daya saing IKM berbasis ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan, dalam menghadapi MEA.

### III. SUSUNAN DELEGASI

Delegasi Panja MEA BKSAP terdiri dari:

1. Yth. Sdr. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (Ketua Delegasi/Frakasi Demokrat)
2. Yth. Sdr. Mahfudz Abdurrahman (Anggota Delegasi/F-PKS)
3. Yth. Sdr. Sudin (Anggota Delegasi/F-PDIP)
4. Yth. Sdr. Betti Shadiq Pasadigoe (Anggota Delegasi/F-PG)
5. Yth. Sdr. Sumail Abdillah (Anggota Delegasi/F-Gerindra)

### IV. KETERANGAN DASAR REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

#### A POLITIK

##### 1. Situasi Dalam Negeri

Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi pada tahun 1978, RRT telah menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya tercepat di dunia. Pada tahun 2012, RRT adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat, baik total nominal PDB dan purchasing power parity/paritas daya beli (PPP), dan juga eksportir terbesar dan importir barang terbesar kedua di dunia. RRT memiliki senjata nuklir dan tentara terbesar di dunia, dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia. Dibandingkan dengan kebijakan closed-door RRT pada pertengahan tahun 1970-an, liberalisasi telah membuat iklim administrasi di RRT menjadi tidak terlalu restriktif.

Partai Komunis Tiongkok (PKT) memegang peran paling penting dalam struktur politik RRT. Proses demokratisasi dan reformasi politik yang dijalankan dengan 'China characteristic' seiring dengan kemajuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat RRT telah melahirkan konsep baru di bidang pembangunan ekonomi yang dikenal dengan 'Beijing Consensus'. Konsep ini merujuk pada keberhasilan Pemerintah RRT dalam membangun dan mendorong perekonomian RRT sehingga dapat bertahan dari hantaman krisis keuangan global tahun 2008–2009 yang ditopang oleh kuatnya stabilitas politik dan keamanan nasional sehingga banyak kalangan menilai RRT dapat menjadi "model baru" dalam membangun suatu negara.

Sejak dicanangkannya kebijakan reformasi 1978, pola kebijakan luar negeri RRT pun mengalami perubahan mendasar. Meskipun tetap mengedepankan kepentingan dalam menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas keamanan, namun pada dasarnya kebijakan politik luar negeri diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan mewujudkan harmonisasi hubungan antarbangsa. Pada awalnya RRT memperkenalkan konsep *peaceful rise*, saat ini pemerintah RRT menggantinya dengan istilah *peaceful development*. Dalam konteks ini, RRT terlihat memanfaatkan berbagai forum internasional/regional dan juga secara bilateral demi mengamankan kepentingan nasionalnya. Pada tingkat regional RRT berpartisipasi aktif, antara lain dalam kerangka kerja sama ASEAN, ARF, EAS, ESCAP, APEC, ACD, BRICS (Brasil, Rusia, India, RRT, dan Afrika Selatan), G20, SCO (Shanghai Cooperation Organization), dan Greater Mekong Subregion (GMS). Sementara pada tingkat multilateral, RRT adalah salah satu anggota tetap DK PBB (P5), ITU, ICAO, IMO, CEDAW, dan badan khusus PBB lainnya. RRT menjadi pihak berbagai perjanjian internasional, antara lain Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Konvensi Senjata Kimiawi, Konvensi Senjata Biologis, dan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT). Pada tingkat bilateral, RRT merangkul beberapa negara kunci di kawasan melalui mekanisme kemitraan strategis, salah satunya adalah dengan Indonesia. Menarik untuk dicermati adalah inisiatif RRT dalam menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi dengan negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Sebagai catatan, peran RRT di Afrika kini terlihat sangat menonjol, tidak saja dalam konteks percaturan politik internasional, namun sebagaimana tercermin dalam posisi RRT menghadapi berbagai isu di Afrika, antara lain dukungan kepada Sudan, mengirim dua kapal frigat rudal ke Teluk Aden dan perairan Somalia untuk melindungi kapal dagang dari pembajakan yang merajalela, serta di bidang ekonomi/perdagangan dan pembangunan infrastruktur yang mana RRT merupakan mitra dagang dan investor utama bagi negara-negara Afrika. EKONOMI Sejak akhir tahun 1970-an, RRT telah mengubah sistem perekonomiannya dari sistem ekonomi tertutup dan *centrally planned* menjadi sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar. Dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut pada tahun 2010 RRT berhasil menjadi eksportir terbesar di dunia. Reformasi ekonomi RRT dimulai secara bertahap yakni keluar dari sistem pertanian kolektif dan meluaskannya dalam liberalisasi harga, desentralisasi fiskal, meningkatkan otonomi BUMN, mendiversifikasi sistem perbankan, mengembangkan pasar saham, meningkatkan pertumbuhan sektor swasta, dan membuka diri terhadap perdagangan, serta investasi luar negeri. Pada tahun 2012, di tengah

terjadinya krisis keuangan global, RRT masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tetap. Beberapa prestasi yang dicapai oleh RRT di antaranya adalah kenaikan GDP dari RMB 26,6 triliun (US\$ 4,2 triliun) menjadi RMB 51,9 triliun (US\$ 8,3 triliun), yang menempatkan RRT di peringkat kedua secara global. Disamping itu, pendapatan pemerintah juga naik dari RMB 5,1 triliun (US\$ 822 miliar) menjadi RMB 11,7 triliun (US\$ 1,88 triliun) dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 58,7 juta. Di bidang infrastruktur, selama periode lima tahun, pemerintah telah berhasil membangun lebih dari 18 juta unit rumah bersubsidi dan perbaikan 12 juta unit rumah di daerah pinggiran. Disamping itu, juga telah berhasil dibangun 19.700 km jalur kereta api, dimana 8951 kmnya adalah jalur kereta api cepat. Pemerintah juga telah membangun 609.000 km jalan baru, dengan 42.000 merupakan jalan tol, yang menambah panjang jalan tol secara keseluruhan menjadi 95.600 km. Lebih lanjut, juga telah dibangun 31 bandara dan 602 pelabuhan untuk 10.000 ton kapal serta pembangunan proyek besar untuk mengalirkan gas dan listrik dari barat ke timur. Salah satu kunci keberhasilan Pemerintah RRT dalam mempertahankan pertumbuhannya di tengah krisis global adalah penerapan kebijakan fiskal yang pro-aktif, kebijakan easy moneter, penerapan kebijakan finansial secara penuh, peningkatan belanja pemerintah, dan membuat pengurangan pajak secara struktural. Disamping itu, juga dilakukan penyesuaian giro wajib minimum dan suku bunga untuk mempertahankan pertumbuhan yang tepat dalam suplai uang dan kredit. Dalam merespon tren perubahan makro ekonomi, pemerintah juga secara cepat mengintensifkan implementasi kebijakan, mengurangi daya dorong dari kebijakan stimulus secara tepat waktu, dan mengimplementasikan kebijakan fiskal pro-aktif dan kebijakan moneter yang hati-hati. Dalam upaya untuk mempercepat penyesuaian struktur ekonomi dan mengembangkan kualitas serta kinerja pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya untuk mendorong permintaan domestik. Sebagai hasilnya, kontribusi permintaan domestik terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat. Di bidang industri, RRT melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan transformasi sektor industri yang akhirnya menjadikan industri manufaktur RRT terbesar di dunia, dengan pertumbuhan nilai tambah tahunan rata-rata mencapai 13,4%. Hal ini sekaligus menjadikan manufaktur teknologi tinggi sebagai pilar utama ekonomi RRT.

Disamping itu, pada periode lima tahun ini, industri strategis termasuk clean energy, konservasi energi, perlindungan lingkungan, teknologi komunikasi dan bio-medicines telah tumbuh dengan

cepat. Kontribusi sektor jasa terhadap GDP juga meningkat sekitar 2,7%, dan membuat sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak dari sektor lain. Perdagangan internasional RRT dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 12,2%/tahun dan RRT menempati peringkat kedua negara perdagangan terbesar dunia. RRT telah menjadi pengekspor terbesar dunia dan kontribusinya terhadap pasar internasional juga meningkat lebih dari 2 percentage point dibandingkan tahun 2007. Untuk investasi, selama lima tahun pemerintah telah menggunakan investasi asing sebanyak US\$ 552,8 miliar. Dan untuk mendorong ekspansi pengusaha RRT keluar negeri, pemerintah menerapkan strategi go global. Outbound direct investment RRT naik dari US\$ 24,8 miliar di tahun 2007 menjadi US\$ 77,22 miliar di tahun 2012, dengan pertumbuhan pertahun mencapai 25,5%. Jumlah ini sekaligus menjadikan RRT sebagai salah satu sumber investasi utama dunia. Tahun 2013 merupakan tahun yang crucial untuk melanjutkan implementasi Rencana Lima Tahunan ke-12. Dalam kaitan ini, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan GDP sebesar 7,5%, CPI (inflasi) sebesar 3,5%, penambahan 9 juta lapangan kerja, tingkat pengangguran urban di bawah 4,6%, dan terus mengembangkan balance of payment. Dalam kaitan ini, pemerintah akan meneruskan kebijakan fiskal yang proaktif, pertama dengan menaikkan defisit dan utang pemerintah melalui cara yang sesuai. Tahun ini, diproyeksikan defisit sebesar RMB 1,2 triliun (US\$ 200 miliar), RMB 400 triliun (US\$ 64,5 miliar) lebih dibandingkan anggaran tahun lalu. Ini terdiri dari defisit pemerintah pusat sebesar RMB 850 milyar (US\$ 137 miliar), dan RMB 350 miliar (56,4 miliar) dalam bentuk obligasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kedua, pemerintah akan memperbaiki kebijakan pemotongan pajak struktural dengan fokus mempercepat proyek percontohan untuk menggantikan business tax dengan VAT.

Ketiga, akan mengoptimalkan struktur pengeluaran pemerintah dengan prioritas pada belanja pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan bidang lain yang penting untuk masyarakat. Pemerintah akan memperketat pengeluaran administratif dan melakukan penghematan. Investasi dari pemerintah pusat utamanya akan dialokasikan untuk proyek rumah bersubsidi, proyek infrastruktur terkait pertanian, jaminan sosial dan proyek lain untuk pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan. Dan keempat, memperkuat pengelolaan utang pemerintah daerah.

## B SOSIAL DAN BUDAYA

Jumlah penduduk RRT pada pertengahan 2014 diperkirakan mencapai 1,355,692,576 (July 2014 est.) atau sekitar 20% dari penduduk dunia, belum termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Tantangan demografi yang dihadapi RRT saat ini, antara lain populasi yang menua, dan tingginya tingkat cacat lahir di wilayah tertentu. Ketidakseimbangan rasio gender pada dasarnya tidak terlalu tajam, yakni laki-laki: 51,3%, perempuan: 48,7%, namun isu yang berkembang adalah sulitnya kaum laki-laki mencari pasangan hidup akibat paradigma sosial yang mengakibatkan kaum perempuan Tiongkok lebih memilih pasangan hidup yang berada ataupun expatriat.

Mengingat ekspor produk industri kreatif telah mencapai 10,4 milyar RMB pada tahun 2010, Pemerintah RRT telah meluncurkan reformasi budaya beserta kelembagaan dan industrinya yang dijelaskan dalam pedoman kebijakan nasional (2011-2015). Pedoman ini berisikan arah dan kepastian dukungan keuangan bagi industri-industri budaya nasional dan ekonomi kreatif di Tiongkok yang melibatkan inovasi budaya, produksi film, publikasi, iklan, hiburan, pameran, digital dan animasi. Pemerintah RRT juga mengantisipasi rendahnya demand akan produk industri kreatif di pasar global dan menguatnya mata uang Renminbi (RMB) dengan mengembangkan cultural creative park sebagai bagian dari pengembangan industri budaya dan pariwisata. Secara keseluruhan, RRT memiliki 2.500 cultural industrial parks, dengan pusat-pusat cultural creative industry diantaranya adalah Shenzhen, Beijing dan Shanghai, yang memiliki situs industri budaya yang beragam serta infrastruktur yang mendukung perkembangannya. Selain itu, per September 2012, RRT memiliki 580 perusahaan percetakan, 3.000 toko buku, 850 studio film, dan 99.5% grup kesenian Tiongkok tergabung dalam perusahaan pertunjukan seni profesional. Industri kreatif RRT menyumbangkan pendapatan negara sebesar 4 trilyun RMB, dengan 1 trilyun RMB berasal dari konsumsi dalam negeri. Industri pariwisata RRT juga masih bertumbuh dengan nilai yang fenomenal, termasuk kunjungan wisata ke luar negeri atau outbound tourism. Kunjungan wisata ke luar negeri dari RRT pada kuartal pertama tahun 2013 mencapai 22,6 juta perjalanan atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012 (data China National Tourism Administration). Sebaliknya, inbound tourist RRT turun sebanyak 2 persen dari tahun

sebelumnya, yakni mencapai 31,6 juta perjalanan. Data WTO juga menunjukkan bahwa pelancong asal RRT juga memiliki overseas spending tertinggi di dunia pada tahun 2012, dengan total spending US\$ 102 Milyar, mengalahkan pelancong asal Jerman dan Amerika Serikat (AS). Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar wisata RRT saat ini, WTO memprediksi RRT akan menjadi sumber turis internasional terbesar di dunia pada tahun 2020. Jumlah wisatawan RRT (mainland, Hong Kong dan Taiwan) yang berkunjung ke Indonesia juga meningkat pesat. Setelah menembus lebih dari 870 ribu turis tahun 2012, pada tahun 2013 tercatat 1,052,871 turis wisatawan RRT (termasuk Taiwan dan Hong Kong) berkunjung ke Indonesia, dengan Pulau Bali dan Yogyakarta sebagai tempat terfavorit. Bekerja sama dengan Garuda Indonesia dan sejumlah biro wisata nasional, KBRI Beijing telah mencanangkan target kunjungan 3 juta pelancong RRT ke Indonesia (2017).

Pertengahan tahun 2013 Pemerintah RRT telah mengesahkan peraturan 'Methods for Governance of Internet Information Services', yang mengharuskan perusahaan penyedia jasa layanan internet dan perusahaan media untuk mengumpulkan identitas asli pengguna media sosial mereka, baik yang memakai jasa blog, micro-blog, maupun bulletin board. Pemerintah RRT menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi pribadi pengguna internet di dunia maya, yang dilakukan dengan memberikan nama dan data asli kepada penyedia jasa internet dan media online. Peraturan ini juga dapat dijadikan basis hukum untuk menjamin keamanan informasi online bagi 538 juta pengguna internet (per Juni 2012, sumber: China Internet Network Information Center – CINIC), serta menjaga perkembangan internet yang sehat di RRT. Kiranya pemberlakuan peraturan ini nantinya akan memberikan tekanan lebih kepada penyedia layanan internet (China Mobile, China Telecom) dan perusahaan media (Sina Corporation, Sohu, Baidu, Youku, dan Tencent Corporation) dan tidak serta merta pada pengguna layanan. Meskipun beberapa pengamat asing dan pengguna internet sudah menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap peraturan baru tersebut, secara umum para pengguna internet (Netizen) di Tiongkok belum menunjukkan perubahan aktivitas. Mereka tetap membahas isu-isu politik, ekonomi dan sosial secara terbuka dalam micro-blog dan media sosial lainnya. Pemerintah RRT menghimbau agar penggunaan internet dan media sosial digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta aktivitas ekonomi. Sementara itu media massa RRT secara garis besar mengikuti himbauan pemerintah untuk meliput isu-isu

yang berkaitan dengan rencana pembangunan lima tahun di Tiongkok, serta mempromosikan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

### C HUBUNGAN BILATERAL DENGAN INDONESIA

1. Hubungan diplomatik RI-RRC dimulai pada 13 April 1950, dibekukan pada 30 Oktober 1967, kemudian dilanjutkan kembali dengan ditandatanganinya MOU on the Resumption of Diplomatic Relations RI-RRC di Jakarta, pada tanggal 8 Agustus 1990.
2. Kunjungan yang merupakan *highlight* dalam hubungan kedua negara antara lain :
  - a. Presiden RRC Hu Jintao telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada April 2005, yang kemudian diikuti kunjungan kenegaraan balasan Presiden RI pada bulan Juli 2005. Pada Oktober 2006, Presiden RI untuk kedua kalinya mengunjungi RRC dalam rangka menghadiri ASEAN-China Commemorative Summit di Nanning, Propinsi Guangxi.
  - b. Pertemuan Presiden RI dengan Presiden RRC juga telah dilaksanakan di sela-sela KTT APEC di Sydney, Australia, September 2007. Presiden RI juga telah bertemu dengan Presiden Hu Jintao di sela-sela KTT ASEM ke-7 di Beijing, RRC pada 23 Oktober 2008. Pada kesempatan pertemuan dimaksud, melalui Presiden Hu Jintao, Presiden RI telah secara lisan menyampaikan undangan (*standing invitation*) kepada PM Wen Jiabao untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.
  - c. Selain kunjungan antar Kepala Negara, pada Agustus 2005 Wapres RI melakukan kunjungan kerja ke Beijing dan menghadiri Boao Forum for Asia di Hainan pada bulan April 2006. Wapres RI juga berkunjung ke RRC pada Juni 2007 guna mengadakan pertemuan bilateral antara lain dengan PM Wen Jiabao. Wapres RI terakhir kali berkunjung ke RRC pada 22 – 24 Agustus 2008 untuk menghadiri acara penutupan Olimpiade Beijing.
3. Kerjasama investasi dua arah kedua negara mengalami perkembangan positif. Hal ini tercermin antara lain dari meningkatnya minat investasi diantara para investor kedua negara. Peningkatan minat tersebut juga terlihat dari beberapa kunjungan delegasi kalangan usaha RRC ke Indonesia guna menjajaki kerjasama investasi pada tahun 2008. Tidak kurang dari 1000 pengusaha RRC telah ke Indonesia tahun 2008 melalui beberapa rangkaian kunjungan.

Terakhir, 300 pengusaha asal Guangdong telah berkunjung ke Indonesia mendampingi Sekjen Partai Guangdong, Wang Yang.

## V. HASIL KUNJUNGAN

Selama kunjungan di Tiongkok, Delegasi Panja MEA BKSAP telah melakukan dialog/pembicaraan dengan empat institusi yaitu: Parlemen Tiongkok (*the National People's Congress/NPC*); Badan Negara untuk Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi Tiongkok (SAPPRFT); CCPIT (*the China Council for the Promotion of International Trade*); dan Perusahaan ICT Huawei.

Adapun hasil-hasil yang diperoleh dari dialog/pembicaraan di empat institusi adalah sebagai berikut:

### 1. Parlemen Tiongkok (*the National People's Congress/NPC*)

- Delegasi diterima oleh **Hon. Mr Shao Ning**, Wakil Ketua Komisi Urusan Ekonomi dan Keuangan NPC. Delegasi Panja MEA menyampaikan bahwa hubungan antar-parlemen dapat memperluas hubungan antar-ke dua negara. Ditekankan urgensi parlemen di kedua negara karena perannya sebagai pembuat undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Oleh sebab itu, diplomasi antar-parlemen sangat vital. Disampaikan bahwa fungsi BKSAP adalah sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang bertugas melaksanakan diplomasi parlemen baik secara bilateral maupun multilateral termasuk dalam menyikapi perkembangan regional. Secara bilateral, melalui BKSAP, saat ini kedua parlemen tengah melakukan pembahasan MoU tentang kerja sama antara DPR dan NPC.
- Secara multilateral, DPR aktif di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) termasuk dalam penyiapan kesuksesan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan ke dalam sejumlah resolusi. Disebutkan bahwa melalui MEA ke depan ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan terbuka untuk negara-negara dunia termasuk Tiongkok yang merupakan kekuatan ekonomi kedua dunia dengan pertumbuhan 6,6%.

- Delegasi Panja MEA menyampaikan alasan kunjungan ke Tiongkok yaitu karena Tiongkok sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dengan industri kreatifnya yang dinilai maju. Delegasi berdiskusi tentang strategi Tiongkok dalam memajukan industri kreatifnya sehingga dapat bersaing di level global.
- Sementara itu Shao Ning menjelaskan bahwa Tiongkok memandang ekonomi kreatif sebagai hal yang sangat serius dan memiliki potensi di masa mendatang. Dijelaskan bahwa terkait peran NPC untuk pembangunan industri kreatif, ada tiga hal yang dilakukan yaitu menyediakan perangkat hukum, pengawasan (monitoring) secara khusus atas industri kreatif dan kepastian hukum dengan pemberlakuan hukum secara sungguh-sungguh guna menjamin perkembangan industri kreatif.
- NPC memaparkan beberapa perangkat hukum produk NPC untuk memajukan industri kreatif antara lain, pertama, Undang-undang Kemajuan Teknologi Tahun 1993 yang diamandemen tahun 2007. Inti Undang-undang tersebut adalah untuk mendorong inovasi dan teknologi di semua level masyarakat dan mendorong riset di bidang masing-masing. Kedua, Undang-undang Transfer Hasil Teknologi Tahun 1996 dan diamandemen Tahun 2016 yang isinya mendorong hasil inovasi dilempar ke pasar dan perusahaan diwajibkan melaksanakan hasil inovasi tersebut serta pemerintah memberikan insentif memadai bagi para peneliti. Ketiga, Undang-undang Hak Cipta tahun 1984 dan diamandemen Tahun 1992 dan Tahun 2000, yang isinya terkait perlindungan hak cipta. Keempat, Undang-undang Promosi Perusahaan Kecil dan Menengah Tahun 2002 dan saat ini tengah dalam proses amandemen. Undang-undang ini intinya untuk memproteksi perusahaan kecil dan menengah.
- Selain itu, pihak NPC menambahkan bahwa strategi memajukan industri kreatif melalui tiga hal yaitu dengan perbaikan lingkungan, perbaikan birokrasi dan perbaikan hukum. Lebih jauh dijelaskan bahwa Pemerintah Tiongkok mendukung penuh universitas-universitas untuk melakukan berbagai inovasi yang diarahkan untuk memajukan UMKM.
- Terkait peran NPC dalam mengembangkan industri kreatif, khususnya untuk memajukan UMKM, disampaikan tiga langkah penting yaitu, pertama, pengawasan terkait pelaksanaan hukum, pembangunan yang berkelanjutan, dan laporan dan penelitian yang hasilnya akan dijadikan topik utama tahunan NPC.

- Dalam sesi tanya-jawab terungkap beberapa hal antara lain: pembagian jenis skala perusahaan pada dasarnya dilihat dari tiga hal yaitu didasarkan atas asetnya, nilai penjualannya, dan jumlah stafnya. Ditemukan pula bahwa di Tiongkok berkomitmen memberikan dukungan untuk perusahaan di bawah pemerintah ataupun swasta. Tiongkok juga memberikan kebijakan khusus bagi pengusaha kecil berbentuk keringanan biaya pendirian usaha kecil, potongan pajak, dan asuransi tenaga kerja akan ditanggung pemerintah. Terungkap pula bahwa Pemerintah Tiongkok menyerahkan proses ekspor ke pasar. Namun dijelaskan bahwa ke depan produk-produk Tiongkok yang merambah pasar global akan semakin menurun. Pasalnya, biaya produksi di Tiongkok sudah semakin mahal. Perusahaan-perusahaan multinasional Tiongkok sudah memulai memindahkan pabrik-pabriknya ke luar Tiongkok seperti ke Kamboja dan Vietnam.
- Di akhir pertemuan, NPC menyerahkan kepada Delegasi BKSAP dokumen undang-undang hasil produk NPC yang mendorong perkembangan dan kemajuan industri kreatif.

## 2. Badan Negara untuk Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi Tiongkok (SAPPRFT)

Delegasi diterima oleh **Yan Cheng Sheng**, Wakil Direktur Kerjasama Internasional SAPPRFT. Di hadapan Delegasi BKSAP, Cheng Sheng menjelaskan bahwa SAPPRFT merupakan badan pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan pers, publikasi, radio, film dan televisi. Kendati pun demikian, pejabat SAPPRFT itu menekankan bahwa pihaknya juga bertanggungjawab atas inovasi kebudayaan. “Semua negara sangat mementingkan pembangunan kebudayaan. Namun industri kebudayaan harus sesuai dengan kebudayaan sendiri. Hal itu karena setiap negara kondisinya berbeda-beda,” kata Cheng Sheng menjelaskan.

Lebih jauh Cheng Sheng menyampaikan bahwa produksi film Tiongkok dimulai tahun 1895. Sejak era keterbukaan pada sekitar tahun 1978, perusahaan-perusahaan swasta yang memproduksi film bermunculan. Saat ini ada sekitar 7000-an perusahaan swasta. “Sejak era keterbukaan, pembuatan film tidak perlu lagi izin pemerintah. Kami hanya melihat dan mengawasi kontennya saja,” ujar Cheng Sheng.

Saat ini, sambung Cheng Sheng, setiap tahunnya di Tiongkok tercatat produksi sekitar 600 film dengan keuntungan yang diperoleh pada tahun 2014 lalu antara lima sampai tujuh juta dollar. Dia juga menyebutkan bahwa sekitar 5% dari keuntungan film akan dialokasikan untuk memajukan produksi film-film berikutnya.

Lebih jauh Cheng Sheng mengatakan bahwa Pemerintah Tiongkok sangat konsen membuat undang-undang terkait pengembangan industri film. Tiongkok juga secara regular mengirim sineas-sineas berbakatnya ke luar negeri untuk mendalami industri film.

“Kami juga mengundang dari sejumlah negara untuk dapat hadir dalam pelatihan singkat kami selama dua pekan terkait industri perfilman,” ujar Cheng Sheng. Terkait hal ini, Ketua Delegasi Nurhayati meminta agar Tiongkok juga dapat mengundang pihak-pihak di Indonesia untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut.

Hal menarik lain disebutkan adalah kebijakan Tiongkok agar film dan program televisi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dalam kaitan ini, Tiongkok membatasi film impor yang memasuki Tiongkok dengan tidak boleh lebih dari 25% dari total film yang beredar dan maksimal 15% dari total waktu tayang film-film yang tengah diputar. SAPPRT juga menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas film domestik dapat juga mengurangi minat penonton terhadap film-film impor.

## VI. SARAN

1. Mengingat adanya keinginan dari kedua pihak (Indonesia – RRT) untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang sebagai mana tersebut diatas, kiranya kepada pihak-pihak terkait dapat menindaklanjutinya.
2. Meskipun terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang berlaku, konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah di RRT menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan seperti dalam menghadapi era persaingan ekonomi.

3. Pemerintah RRT sangat serius dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif yang ditunjukkan dengan banyaknya produk legislasi yang berkaitan dengan industri kreatif serta besarnya dana riset untuk perkembangan industri kreatif.

## VII. PENUTUP

### Kata Penutup

Kunjungan Delegasi BKSAP ke RRT telah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh program kegiatan yang telah di jadwalkan dapat berjalan dengan baik dan dalam kondisi yang aman sehingga Delegasi dapat kembali ke Indonesia dengan selamat

Jakarta Desember 2015

KETUA DELEGASI



**Dr. Nurhavati Ali Assegaf, M.Si**

A-432

